

**PERBANDINGAN REKRUTMEN POLITIK CALON
LEGISLATIF PARTAI PKS DAN PDIP DALAM PEMILU
LEGISLATIF 2014 DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

Oleh :

NOLA MUSTIKA
NIM 1564302021

Diajukan

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

**PROGRAM STUDI POLITIK ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2019

SKRIPSI

**PERBANDINGAN REKRUTMEN POLITIK CALON LEGISLATIF PARTAI PKS
DAN PDIP DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014 DI KOTA PALEMBANG**

yang telah disusun dan dipersiapkan oleh

NOLA MUSTIKA
NIM. 1564302021

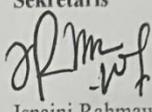
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 24 Juli 2019

Susunan Dewan Pembimbing dan Penguji

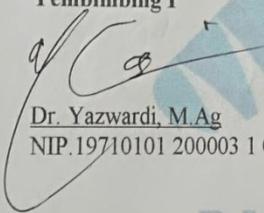
Ketua Dewan Penguji


Dr. Mohammad Syawaluddin, M.Ag
NIP. 19711124 2002312 1 001

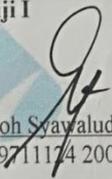
Sekretaris


Isnaini Rahmawati M.Hum
NIDN. 2008089301

Pembimbing I


Dr. Yazwardi, M.Ag
NIP. 19710101 200003 1 006

Penguji I


Dr. Moh Syawaluddin, M.Ag
NIP. 19711124 2002312 1 001

Pembimbing II

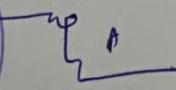

Ryllian Chandra Eka Viana, M.A
NIP. 19860405 201903 1 011

Penguji II

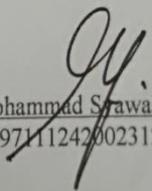

Nico Oktario Adityas M.A
NIDN. 2010109102

Skripsi Ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
Tanggal, 05 Agustus 2019

Dekan
Fakultas Adab Dan Humaniora


Dr. Nor Huda, M.Ag, M.A
NIP. 19701114 200003 1 002

Ketua Program Studi
Politik Islam


Dr. Mohammad Syawaluddin M.Ag
NIP. 19711124 2002312 1 001



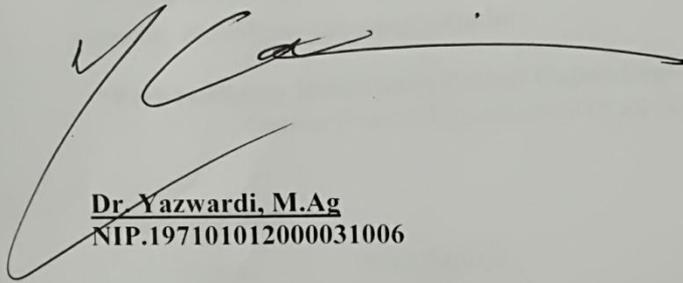
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang dibuat oleh Nola Mustika NIM 1564302021

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Palembang, $\frac{11}{7}$ 2019

Pembimbing I



Dr. Yazwardi, M.Ag
NIP.197101012000031006

Palembang, 8 Juli 2019

Pembimbing II



Ryllian Chandra Eka Viana, M.A
NIP. 198604052019031011

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nola Mustika

NIM : 1564302021

Jurusan : Politik Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Sepengetahuan saya, skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini. saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Palembang, 18 - 07 - 2019



Nola Mustika
NIM: 1564302021

MOTO DAN PERSEMBAHAN

**“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja
keras (untuk urusan yang lain).”**

(QS. Al-Insyirah: 6-7)

**“Berpikir tentang hari kemarin tanpa penyesalan.
Berpikir tentang hari esok tanpa rasa takut.”**

(RanggaUmara)

Kepersembahkan kepada :

- **Ayahanda dan ibunda tercinta yang telah memberikan dukungan moril maupun materil selama perkuliahanku sampai sekarang.**
- **Saudara-saudara tersayang ku uniii Siska, uda Edo, adikku Abdul Shomad yang telah memberikan semangat serta motivasi kuliah untuk menyelesaikan pendidikan ini.**
- **Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang.**

KATA PENGANTAR

Segala puji atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, baik itu nikmat Iman, Islam dan sehat walafiat, karena sehat kita dapat menjaga Ke-Imanan kita, kita menjaga Ke-Islaman kita dan kita tetap bisa menjalankan segala aktifitas kita. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan, kita limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhamad SAW yang menjadikan kisah hidupnya menjadi rujukan awal kita dalam kehidupan di dunia ini.

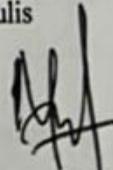
Berkat ridho, petunjuk, dan pertolongan Allah SWT skripsi yang berjudul **“Perbandingan Rekrutmen Politik Calon Legislatif Partai PKS Dan PDIP Dalam Pemilu Legislatif 2014 Di Kota Palembang”** ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan semangat dari berbagai pihak dan untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang yang menjadi motivator, inspirator sebagai sumber perjalanan studiku dalam melangkah. Mereka adalah kedua orang tua ku Ayahanda Jamhur dan Ibunda tercinta Nurida. Yang telah rela ikhlas siang malam mengeluarkan keringat untuk berjuang demi kesuksesan anak-anaknya dalam studi serta do'a-do'a mulianya yang selalu mereka dipanjatkan.
2. Untuk saudara-saudariku tercinta juga berperan penting dalam memberikan dukungan, semangat, inspirasi serta doa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
3. Dr. Nor Huda, M.A, selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora.

4. Dr. Moh. Syawaluddin M.Ag selaku Kaprodi Politik Islam.
5. Dr. Yazwardi M.Ag, selaku pembimbing I, terima kasih telah sudi memberikan waktu untuk mengarahkan dan memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Rillyan Chandra Eka Viana, M.A, selaku pembimbing II, terima kasih telah sudi memberikan waktu untuk mengarahkan dan memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen-dosen akademik Fakultas Adan dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang.
8. Serta semua rekan-rekan satu kelas seperjuangan Euis Suhartina, Umi Hasanah, Tutyk Andini, Ananda Vita, Shela dan lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT yang dapat membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu. Saya selaku penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyusunan kata dan tata bahasa, karena sema yang benar hanyalah milik Allah SWT dan semua kesalahan terdapat pada hambanya.

Palembang, 27-08-2019
Penulis



Nola Mustika
NIM. 1564302021

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Pemetaan Ideologi Partai-Partai Politik Peserta Pemilu 2014

Tabel 2 : Majelis Pertimbangan Daerah (MPD)

Tabel 3 : Dewan Syariah Daerah (DSD)

Tabel 4 : Dewan Pengurus Daerah (DPD)

Tabel 5 : Perbedaan Pola Rekrutmen Caleg PKS dan PDIP

Tabel 6 : Persamaan Rekrutmen Caleg PKS dan PDI-P

Tabel 7 : Jenjang Pengkaderan Partai PKS dan PDIP

Tabel 8 : Organisasi Sayap Partai PKS dan PDIP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Konsultasi Skripsi Pembimbing I dan II

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

Lampiran 3 : Daftar Informan Wawancara

Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 5 : Surat Keterangan Lulus BTA & Tahfidz

Lampiran 6 : Fotocopy Nilai Komprehensif

Lampiran 7 : Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat PKS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING I	v
NOTA DINAS PEMBIMBING II	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan masalah dan Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Partai Politik.....	23
B. Rekrutmen Partai Politik	25
C. Pola Rekrutmen Partai Politik.....	26
D. Pelembagaan Partai Politik	30

BAB III : Gambaran Umum DPD PKS Dan PDIP Kota Palembang

A. Deskripsi Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang	36
B. Deskripsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Palembang	52

BAB IV : Mekanisme Rekrutmen Caleg DPD PKS Dan DPC PDIP Kota Palembang

A. Rekrutmen Politik Calon Legislatif DPD PKS Kota Palembang	63
B. Metode Rekrutmen Partai PKS DPD Kota Palembang.....	68
C. Indikator Keanggotaan Dan Sistem Kaderisasi Partai PKS	70
D. Faktor Penghambat Dan Pendukung	72
E. Rekrutmen Politik Calon Legislatif PDIP DPC Kota Palembang	74
F. Metode Rekrutmen Partai PDI-P Kota Palembang.....	78
G. Indikator Keanggotaan Dan Sistem Kaderisasi Partai PDI-P	79
H. Faktor Penghambat Dan Pendukung	81
I. Perbedaan Rekrutmen Caleg PKS Dan PDI-P.....	82

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji proses pencalonan anggota legislatif lokal (DPRD kota) yang dilakukan oleh DPD PKS dan DPC PDIP dalam pemilu legislatif 2014. Sejumlah problem penting dalam penelitian ini berkaitan dengan proses kemunculan para kandidat atau caleg, tahapan yang harus dilalui para caleg, kriteria dan acuan yang digunakan partai politik dalam menjaring caleg, orientasi partai dalam menentukan daftar caleg. Sejumlah problem tersebut sejauh ini tidak pernah dijelaskan secara memadai karena terbatasnya studi tentang kemunculan elit politik di lembaga legislatif di Indonesia terutama tingkat lokal.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah *comparative analysis* atau analisa perbandingan, yakni penelitian untuk mendeskripsikan secara obyektif dan sistematis fenomena perbandingan tentang rekrutmen caleg kedua partai. Penelitian ini menggunakan teori rekrutmen partai politik dan pelebagaan partai politik.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam melakukan upaya rekrutmen caleg, Partai PKS hanya merekrut Bacaleg kader. PKS sebagai partai yang berasaskan agama memiliki sifat agama yang *Inklusif* (terbuka) maka yang akan menjadi bacaleg harus sesuai dengan kriteria yang sesuai dengan AD/ART partai. PKS tidak sembarang merekrut bacaleg yang sebelumnya belum pernah aktif dalam kegiatan kepartaian di PKS. Sehingga tidak semua bacaleg yang hendak menjadi caleg dapat lolos begitu saja karena dalam proses seleksi pun dinilai juga keaktifan dan kontribusinya terhadap partai, semakin aktif ia di organisasi maka kesempatan untuk lolos menjadi caleg semakin besar. Hal ini juga terkait dengan pendidikan politik yang PKS usahakan terhadap calon legislatif yang diusungnya, karena itu semua caleg PKS mayoritas memang orang-orang yang sudah benar-benar memiliki pengalaman berpolitik dan aktif dalam partai. Sedangkan partai PDI-P merekrut Bacaleg baik kader maupun non-kader. Bacaleg non-kader (tokoh masyarakat) dari berbagai lapisan dapat secara otomatis mendaftar sebagai bacaleg partai PDI-P dan memiliki kesempatan yang sama, baik berasal dari orang yang sebelumnya belum pernah mengadakan kerjasama dengan partai PDIP, asalkan memang bacaleg memiliki kapabilitas dan loyalitas terhadap partai. Semua didasarkan atas hasil seleksi terhadap kemampuan dan loyalitas terhadap partai.

Dari penjelasan kedua partai ditemukan bahwa pola rekrutmen yang dipakai partai PDI-P sesuai dengan teori pola rekrutmen Rush dan Althoff perihal partai PDI-P memberikan kebebasan yang sama kepada semua warga negara untuk menjadi Caleg. Sedangkan PKS tidak.

Kata Kunci : Rekrutmen, Partai Politik, Pemilu

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini mengkaji proses pencalonan anggota legislatif lokal (DPRD kota) yang dilakukan oleh DPD PKS dan DPC PDIP dalam pemilu legislatif 2014. Sejumlah problem penting dalam penelitian ini berkaitan dengan proses kemunculan para kandidat atau caleg, tahapan yang harus dilalui para caleg, kriteria dan acuan yang digunakan partai politik dalam menjaring caleg, aktor-aktor dibalik penentuan nomor urut, orientasi partai dalam menentukan daftar caleg. Sejumlah problem tersebut sejauh ini belum pernah dijelaskan secara memadai karena terbatasnya studi tentang kemunculan elit politik di lembaga legislatif di Indonesia terutama tingkat lokal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah *comparative analysis* atau analisa perbandingan, yakni penelitian untuk mendeskripsikan secara obyektif dan sistematis fenomena perbandingan tentang rekrutmen caleg kedua partai.

Studi ini didasarkan pada penelitian lapangan yang difokuskan pada rekrutmen caleg DPD PKS dan caleg DPC PDIP dalam pemilu 2014. Terdapat dua alasan tentang pemilihan dua partai ini menjadi agenda penelitian.

Pertama, sesuai dengan Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera Pasal 2 (ayat 1) menyebutkan bahwa PKS merupakan partai yang berasaskan

Islam¹, dengan struktur partai yang kuat dan dukungan yang solid, bahkan militan jika dibandingkan dengan representasi partai Islam manapun termasuk PPP dan PBB. Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disingkat PDI-P dalam Anggaran Dasar partai yang tertulis pada BAB II Pasal 5 (ayat 1) menerangkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berasaskan Pancasila. PDIP merupakan representasi partai nasionalis yang memiliki infrastruktur partai yang kuat, kepengurusan yang solid dari pusat sampai daerah, kader-kader yang berkualitas dan berpengalaman dalam hiruk pikuk politik.²

Tabel 1.
Pemetaan Ideologi Partai-partai Politik Peserta Pemilu 2014

NoUrut	Nama Partai	Asas/Ideologi	Identifikasi
1.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Pancasila	Nasionalis- Sekuler
2.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Pancasila dengan <i>Prinsip ahlu sunna wal jamaah</i>	Islam
3.	Partai Keadilan Sejahtera	Islam	Islam
4.	Partai Golongan Karya	Pancasila dan bersifat moderat dan majemuk	Pancasila

¹<http://pks.id/file/ad-art-pks> diakses pada 05 April 2019 pukul 16:39 WIB

²<https://www.pdiperjuangan.id/article/category/child/28/Partai/AD/ART> diakses pada 08 April 2019

5.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Pancasila dan UUD 1945	Nasionalis-Sekuler
6.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Pancasila dan UUD 1945	Nasionalis-Sekuler
7.	Partai Demokrat	Pancasila/Nasionalis	Nasionalis
8.	Partai Amanat Nasional (PAN)	Pancasila dan berakar pada moral agama	Islam
9.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Islam	Islam
11.	Partai Bulan Bintang (PBB)	Islam	Islam

Sumber: Diolah dari AD/ART partai masing-masing.

Kedua, PDI-P sebagai pemenang terbanyak Partai Nasionalis atas perolehan kursi di DPRD kota Palembang dengan 9 kursi bila dibandingkan dengan partai nasionalis lain. Sedangkan Partai PKS sebagai Partai Islam mendudukkan kadernya sebanyak 3 kursi di DPRD kota Palembang.³

Ketiga, PKS merupakan partai era reformasi yang terus mengalami perkembangan yang signifikan, memiliki jiwa bertarung yang luar biasa dan memiliki konsistensi yang tinggi dalam menegakkan dakwah dan politik dan didukung sumber daya yang unggul dan pantang menyerah. Sedangkan partai PDI-P merupakan partai petarung lama dalam kancah politik Indonesia sejak orde baru dan tetap eksis hingga kini. Jadi studi ini mempelajari pertarungan

³<http://palembang.Tribunnews.com/2014/04/21/kpu-kota-palembang-sahkan-hasil-rekapitulasi>. diakses pada Kamis 24 April 2019

kader-kader partai Islam dan baru melawan kader-kader partai lama, berpengalaman dan selalu memegang kendali pemerintahan.⁴

Dalam menentukan pilihan atas dua partai ini, penulis membandingkan dengan partai lain pada ideologi yang sama yakni antara ideologi agama dan nasionalis dan menggunakan acuan komposisi caleg laki-laki dan perempuan, komposisi pendidikan dan komposisi usia. Pilihan atas partai PKS, penulis membandingkan dengan partai-partai yang berideologi Islam yaitu PPP dan PBB. Dari ketiga komposisi yang penulis bandingkan, ternyata partai PKS unggul dalam semua komposisi. PPP dan PBB hanya sedikit merekrut caleg perempuan karena berdasarkan ideologi Islam tentang perempuan tidak boleh menjadi pemimpin politik. Tingkat pendidikan caleg PPP dan PBB sebetulnya banyak yang telah berpendidikan tinggi, namun jauh dibawah partai PKS. Bahkan PPP juga banyak merekrut caleg berusia senior atau tua. Inilah alasan penulis menggunakan sampel partai PKS untuk penelitian ini yang dibandingkan dengan partai PDI-P.⁵

Pilihan atas partai PDIP dibandingkan dengan partai Golkar sama-sama sebagai partai senior di kota Palembang. Dalam studi perbandingan, ternyata tiga komposisi di atas lebih unggul digunakan partai PDIP. Partai Golkar lebih sedikit memberikan porsi caleg perempuan, komposisi pendidikan SMA lebih banyak dan komposisi usia senior atau tua partai Golkar merekrut lebih banyak. Inilah alasan penulis menggunakan sampel partai PDIP untuk penelitian ini yang dibandingkan dengan PKS.

⁴Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS dan Syariah*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012). Hal 209-210.

⁵*Ibid*

Studi ini sebagai analisis terhadap problem mekanisme rekrutmen caleg kedua partai di kota Palembang. Studi perbandingan atas dua partai semakin menarik karena mekanisme rekrutmen caleg DPD PKS menggunakan kualifikasi dan logika agama, sedangkan mekanisme rekrutmen caleg DPC PDI-P menggunakan kualifikasi dan logika di luar konteks agama. Namun studi ini tidak akan mempertentangkan teori rekrutmen dengan kualifikasi agama atau non agama atau mencari sisi ideal dari salah kedua partai. Semua analisis dalam studi benar-benar merupakan analisis data ilmiah yang ditopang dengan berbagai kerangka teori berdasarkan data lapangan. Rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi dalam mencetak pemimpin yang berkualitas. Menurut Agustino, salah satu fungsi partai adalah melakukan rekrutmen guna mengisi jabatan-jabatan yang dibutuhkan oleh lembaga negara.⁶

Miriam Budiardjo juga mengatakan rekrutmen politik sangat berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal maupun kepemimpinan nasional. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader partai yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan mengembangkan diri. Selain itu partai juga tidak akan sulit menentukan calon pemimpin yang akan diajukan sebagai calon pemimpin baik eksekutif maupun legislatif.⁷ Berkaitan dengan konteks sistem rekrutmen politik, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 pasal 29 ayat 2 telah menjelaskan bahwa proses

⁶Agustino Leo, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009). Hal. 104

⁷Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008). Hal. 408

seleksi kepala daerah harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART partai, yaitu:

*“Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c (bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah) huruf d (bakal calon Presiden dan Wakil Presiden) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta perundang-undangan.”*⁸

Merujuk pada undang-undang nomor 2 tahun 2011 pasal 29 ayat 2 di atas, maka proses rekrutmen partai politik harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta perundang-undangan yang berlaku. Rekrutmen politik secara demokratis mempunyai makna yaitu berlandaskan nilai-nilai/prinsip demokrasi yaitu kebebasan, kesamaan atau keadilan dan kedaulatan suara mayoritas. Sedangkan makna keterbukaan diartikan sebagai upaya partai politik untuk menerima semua golongan atau kelompok masyarakat untuk bergabung dengan partainya dan mengikuti pembinaan serta proses kaderisasi di internal partai.

Dalam konteks rekrutmen politik parlemen, ada sejumlah gejala yang tidak kondusif bagi proses membangun demokrasi.

Pertama, sistem pemilihan umum proporsional telah mengabadikan dominasi oligarki dalam proses rekrutmen. Elite partai di daerah sangat berkuasa penuh terhadap proses rekrutmen, yang menentukan siapa yang bakal menduduki “nomor topi” dan siapa yang sengsara menduduki “nomor sepatu”. Dalam pemilu legislatif 2014, sebetulnya nomor urut topi tidak

⁸Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang *Partai Politik*

menentukan caleg dapat terpilih menjadi anggota legislatif, namun telah diprediksi sejak awal sulit bagi caleg di partai manapun memperoleh suara signifikan dalam BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) di suatu daerah pemilihan. Jika tidak memenuhi BPP, caleg dapat menjadi anggota legislatif dengan mengikuti nomor urut.⁹

Kedua, proses rekrutmen tidak berlangsung secara terbuka dan partisipatif. Pihak kandidat sama sekali tidak mempunyai sense terhadap konstituen yang menjadi basisnya karena dia hanya “mewakili” daerah administratif (bukan konstituen yang sebenarnya), sehingga pembelajaran untuk membangun akuntabilitas dan responsivitas menjadi sangat lemah. Sebaliknya masyarakat juga tidak tahu siapa kandidat yang bakal mewakilinya, yang kelak akan membawa dan mempertanggungjawabkan mandat. Publik sering bilang bahwa masyarakat hanya bisa “membeli kucing dalam karung”.¹⁰

Ketiga, dalam proses rekrutmen tidak dibangun relasi yang baik antara partai politik dan masyarakat sipil. Masyarakat sipil hanya dipandang secara numerik sebagai angka, bukan sebagai konstituen yang harus dihormati dan diperjuangkan. Berbagai organisasi masyarakat hanya ditempatkan sebagai *underbow*, sebuah mesin politik yang memobilisasi massa, bukan sebagai basis perjuangan politik partai.

⁹Mohammad Najib, *Penentuan Calon Terpilih Anggota DPR, DPRD dan DPD Dalam Pemilu Legislatif*, (Yogyakarta: UGM, 2008). Hal. 7

¹⁰Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 51 tentang sistem terbuka dalam rekrutmen caleg partai.

Keempat, proses pemilihan umum dan proses rekrutmen bekerja dalam konteks “massa mengambang” yang kurang terdidik dan kritis. Dalam jangka yang cukup panjang masyarakat Indonesia tidak memperoleh pendidikan politik secara sehat sehingga menghasilkan jutaan pemilih tradisional yang sangat rentan dengan praktik-praktik mobilisasi (*mobilized voters*).¹¹

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Pembatasan masalah adalah usaha untuk menetapkan batasan dari masalah penelitian yang akan teliti. Batasan masalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termaksud dalam ruang lingkup masalah penelitian dan faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian. Sehingga akan mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, dan penulisan skripsi ini tidak meyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula direncanakan. Maka batasan masalah dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan tentang mekanisme rekrutmen politik antara partai politik Islam (PKS) dan partai politik Nasionalis (PDI-P) pada Pemilu 2014 kota Palembang.¹²

Rumusan masalah ini merupakan panduan awal bagi penulis untuk penjelajahan pada obyek yang diteliti.¹³ Maka dari itu, dari uraian latar belakang masalah diatas yang menjadi pokok penelitian ini adalah “Bagaimana mekanisme rekrutmen politik antara partai politik Islam (PKS)

¹¹Josef Christofel Nalenan, *Pendidikan Politik, Parpol dan Pemilu Legislatif 2009*, (Jakarta: Jaringan Pemilih Pemilu Rakyat, 2008). Hal. 4

¹²Dudug Abdurrahman, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Ombak, 2011), Hal. 126

¹³Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2004), Hal.290

dan partai politik Nasionalis (PDI-P) pada Pemilu 2014 kota Palembang dengan sub-sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme rekrutmen caleg DPD PKS dan caleg DPC PDI-P kota Palembang pada pemilu legislatif 2014?
2. Apa indikator yang dipakai partai PKS dan PDIP dalam rekrutmen politik di kota Palembang?
3. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam rekrutmen politik oleh partai PKS dan PDIP pada pemilu legislatif 2014 di kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan. Dengan menggunakan metode kualitatif maka peneliti dapat menemukan pemahaman luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang kompleks.¹⁴ Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme rekrutmen caleg PKS dan caleg PDI-P kota Palembang dalam Pemilu legislatif 2014.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam rekrutmen politik oleh partai PKS dan PDIP pada pemilu legislatif 2014 di kota Palembang.

¹⁴*Ibid*

3. Dapat mengetahui indikator yang dipakai partai PKS dan PDIP dalam rekrutmen politik di kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis, dan praktis. Untuk penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk mengembangkan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah.¹⁵

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi prodi Politik Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagai sumbangan untuk pengembangan pengetahuan bidang politik, terutama dalam hal mekanisme rekrutmen politik partai Islam (PKS) dan partai Nasionalis (PDIP).

2. Secara Praktis

- a. Manfaat Praktis bagi penulis adalah penelitian ini diharapkan meningkatkan pengetahuan penulis mengenai partai politik yang lebih spesifik ke dalam mekanisme rekrutmen politik partai Islam (PKS) dan partai politik Nasionalis (PDI-P).
- b. Manfaat praktis bagi pihak yang diteliti adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran ataupun masukan kepada partai politik mengenai mekanisme rekrutmen politik dalam praktiknya.

¹⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2004), Hal.291

E. Tinjauan Pustaka

Dalam memperkuat basis penelitian tentang rekrutmen politik, penulis telah melakukan telaah pustaka penelitian sebelumnya untuk memberikan perbedaan perspektif terhadap penelitian ini. Penelitian tentang rekrutmen politik telah dilakukan dengan segmen berbeda-beda.

Pertama, Penelitian proses rekrutmen politik yang diteliti oleh Helmi Mahadi tahun 2011 bersumber dari jurnal yang berjudul “Pragmatisme Politik: Proses Rekrutmen Politik PDIP pada Pilkada Kabupaten Sleman”.¹⁶ Ringkasan penelitiannya tentang proses rekrutmen kandidat bupati Sleman yang dilakukan oleh PDI-P beserta bagaimana perilaku partai PDI-P yang selalu mendominasi di kursi legislatif Sleman. Hasil penelitiannya menunjukkan, bahwa kegagalan PDI-P dalam mengusung kandidat dari internal partai adalah karena terjadinya pragmatisme politik. Dalam konteks ini, pragmatisme bersumber dari dua hal. Pertama, faktor internal, yaitu kegagalan kaderisasi PDI-P Sleman dan fenomena uang sebagai penentu perekrutan kandidat. Kedua, faktor eksternal, yaitu budaya politik masyarakat yang berpengaruh tidak secara langsung melalui persepsi elit terhadap kecenderungan pilihan publik.

¹⁶Jurnal Studi Pemerintahan Vol.2 No.1 Februari 2011 *Pragmatisme Politik: Studi Kasus Proses Rekrutmen Politik Pdi-P Pada Pilkada, Kabupaten Sleman* / HELMI MAHADI / <http://dx.doi.org/10.18196/jgp.2011.0004>

Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah fokus dan objek penelitian. Helmi Mahadi lebih melihat proses rekrutmen kandidat bupati Sleman yang dilakukan oleh PDIP beserta bagaimana perilaku partai PDI-P yang selalu mendominasi di kursi legislatif Sleman. Sedangkan penulis lebih menganalisis pola rekrutmen yang merupakan langkah awal dalam menetapkan calon legislatif.

Kedua, Penelitian tentang fungsi partai dalam rekrutmen politik yang di teliti oleh Afifa Wakhidatul bersumber dari Skripsi Universitas Negeri Semarang tahun 2011 berjudul “Implementasi Fungsi Partai Politik sebagai Sarana Rekrutmen Politik pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Semarang”¹⁷, yang mengungkapkan bahwa rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi partai politik yang penting bagi kontinuitas dan kelestarian partai politik. Anggota yang telah direkrut oleh partai, dilanjutkan dengan kaderisasi yang berguna bagi partai untuk kepentingan rekrutmen pengurus, rekrutmen calon anggota legislatif, serta rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Semakin besar andil partai politik untuk memenangkan perjuangan dalam pengisian jabatan dalam pemerintahan, merupakan indikator bahwa peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berjalan secara efektif. Namun disisi lain, ditengah pertumbuhan partai politik di Indonesia, implementasi rekrutmen politik sering ditemukan fenomena yang dianggap sebagai kecurangan, seperti adanya istilah kader loncatan, kader karbitan atau kader titipan.

¹⁷Afifa Wakhidatul, *Implementasi Fungsi Partai Politik sebagai Sarana Rekrutmen Politik pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)*, (universitas negeri semarang: 2011)

Yang membedakan penelitian penulis dengan peneliti sebelumnya adalah fokus penelitian, fokus peneliti sebelumnya adalah bagaimana implementasi rekrutmen politik oleh PDI Perjuangan Kabupaten Semarang beserta faktor pendorong dan penghambatnya. Tujuan dari penelitian sebelumnya adalah untuk mengetahui pelaksanaan rekrutmen politik oleh PDI Perjuangan Kabupaten Semarang beserta faktor yang mendorong dan menghambat. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah mengetahui bagaimana mekanisme rekrutmen politik calon anggota legislatif partai politik pada pemilu legislatif 2014 di kota Palembang.

Ketiga, Penelitian tentang sistem rekrutmen dan kaderisasi yang diteliti Riski Khoiruly dalam jurnal penelitian Universitas Diponegoro tahun 2013 yang berjudul “Sistem Rekrutmen dan Kaderisasi PDI perjuangan Kabupaten Kendal Era Reformasi”¹⁸ Tulisan ini ingin melihat bagaimana rekrutmen, kaderisasi dan kelembagaan politik yang dijalankan oleh PDI Perjuangan Kabupaten Kendal sebagai salah satu agen konsolidasi demokrasi. Dalam tulisannya menilai bahwa kiprah partai politik yang berperan sebagai pilar atau aktor demokrasi justru tidak demokratis. Struktur dan kepemimpinan partai politik merupakan duplikasi dari struktur tradisi sosio-kultural. Seperti halnya dalam pengambilan kebijakan yang terkadang bersifat sentralistik sebagai perwujudan oligarki, dimana kewenangan menentukan calon kepala daerah berada di tangan pengurus partai pusat. Contoh lain oligarki kiprah partai politik yakni pada proses nominasi, pencalonan,

¹⁸Riski Khoiruly, *Sistem Rekrutmen dan Kaderisasi PDI-P Kabupaten Kendal Era Reformasi*, (Universitas Diponegoro: 2013)

penetapan calon legislatif maupun eksekutif yang diisi berdasarkan kekerabatan atau oleh anak istri dan anggota keluarganya untuk melanggengkan kekuasaannya.

Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian dan lokasi penelitian. Fokus penelitian sebelumnya hanya pada partai PDI-P di Kabupaten Kendal, sedangkan penulis membandingkan mekanisme rekrutmen antara partai PDIP dan PKS yang memiliki perbedaan ideologi antara partai nasionalis dan islamis.

Keempat, Penelitian model rekrutmen oleh Yohanis Tandisosang dalam tesis di Universitas Indonesia yang berjudul “Model Rekrutmen dalam Penentuan Bakal Calon Kepala Daerah pada Pilkada DKI Jakarta Periode 2007-2012”¹⁹ Peneliti mengatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) selama ini pada kenyataannya mengalami beberapa penyimpangan (distorsi) dari ketentuan perundang-undangan dengan politik oligarki dimana kepentingan partai bahkan kepentingan segelintir elit partai sering memanipulasi kepentingan masyarakat. Sementara ketentuan perundang-undangan banyak mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung secara demokratis. Salah satu tahap yang cukup penting dalam pelaksanaan pilkada yakni proses rekrutmen bakal calon oleh partai politik. Sehingga memunculkan pertanyaan apakah partai politik akan menjamin terlaksananya mekanisme yang demokratis dan transparan dalam melaksanakan konvensi penjurangan bakal calon yang diumumkan secara luas

¹⁹Yohanis Tandisosang, *Model Rekrutmen dalam Penentuan Bakal Calon Kepala Daerah pada Pilkada DKI Jakarta Periode 2007-2012*, (Universitas Indonesia)

kepada masyarakat serta sejauh mana partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat dalam proses penetapan calon.

Yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penulis adalah fokus penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya fokus kepada model rekrutmen dalam penentuan bakal calon kepala daerah pada pilkada DKI Jakarta periode 2007-2012. Sedangkan penulis lebih fokus pada pola rekrutmen partai lebih spesifik pada partai PDI-P dan PKS pada pemilu legislatif 2014 kota Palembang.

Kelima, Penelitian oleh Teguh Adi Prasajo yang berjudul “Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif (Caleg) Dari Partai Golkar Untuk DPRD Jateng Periode 2014-2019”²⁰ peneliti menganalisis bahwa dalam proses rekrutmen Caleg yang dilaksanakan oleh DPD partai Golkar Jateng terjadi kesenjangan informasi antara Caleg dari Intern partai dan Ekstern partai. Kesenjangan ini bisa saja dikarenakan tidak disebarkannya Keputusan DPP tentang pedoman penyusunan daftar calon anggota DPR-RI, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Politik kepada seluruh bakal calon legislatif (Bacaleg) baik itu internal maupun eksternal partai, hal ini menimbulkan ketidakpuasan bagi Bacaleg khususnya bagi Bacaleg yang tidak memperoleh informasi mengenai adanya keputusan dari pusat tersebut. Seharusnya setelah semua Bacaleg menerima informasi yang sama tentang keputusan tersebut tidak akan ada ketidakpuasan dari Bacaleg karena mereka sudah mengetahui

²⁰Politika, Vol. 4, No. 2, Oktober 2013 *Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif (Caleg) Dari Partai Golkar Untuk DPRD Jateng Periode 2014-2019*

sebelumnya. Dan bagi Bacaleg dari Ekstern yang merasa tidak puas dengan keputusan tersebut akan memilih partai lain yang sesuai dengan keinginannya.

Yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya fokus pada proses rekrutmen caleg oleh DPD partai Golkar, sedangkan penulis meneliti perbandingan proses rekrutmen caleg oleh DPD partai PKS dan PDI-P pada Pileg 2014 di kota Palembang.

Dari tinjauan pustaka diatas secara garis besar bahwa belum ada yang membahas secara khusus tentang Perbandingan Rekrutmen Politik Calon Legislatif Partai PKS dan PDI-P dalam Pemilu Legislatif 2014 di kota Palembang, sedangkan guna tinjauan pustaka diatas untuk menentukan posisi tulisan dimana dengan penelitian yang sudah ada, konteks pembahasan yang dilakukan oleh peneliti tersebut diatas mempunyai cakupan yang luas mengenai Rekrutmen Politik Caleg. Maka penelitian yang penulis lakukan ini memfokuskan pada “Perbandingan Rekrutmen Politik Calon Legislatif PKS dan PDI-P dalam Pemilu Legislatif 2014 di kota Palembang”.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti dengan menggunakan catatan-catatan buku (sistem dan metode) dari masing-masing disiplin ilmu yang diperlukan dalam penelitian. Metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengukur hasil keberhasilan dalam suatu peneliti.

Metode adalah cara, jalan, atau petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknik.²¹

Dalam metodologi penelitian sosial, metodologi penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.²²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis kebijakan-kebijakan partai politik yang berkaitan dengan mekanisme rekrutmen politik, yang mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antara fenomena-fenomena yang sedang diteliti.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan serta hasil dari pengamatan yang dilakukan di lapangan. Data kualitatif yang digunakan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek. Dalam hal ini penulis berusaha mendeskripsikan dan menggambarkan bagaimana mekanisme rekrutmen politik antara partai politik Islam (PKS) dan partai politik Nasionalis (PDI-P) pada Pemilu 2014 kota Palembang menganalisa sumber-sumber data serta fakta akan digunakan untuk merekonstruksi peristiwa yang

²¹Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2010), Hal.103

²²Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora*, (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah, 2014), Hal.20

terjadi. Dengan demikian, data kualitatif tidak berupa angka tetapi berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai metode, kurikulum, peran, sistem, dan kontribusi dari sebuah gejala atau pertanyaan yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Sesuatu ini berupa benda-benda fisik, pola-pola perilaku, atau gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan bisa juga peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu masyarakat.

3. Sumber Data

Pada tahap ini penulis mengumpulkan sumber data dalam usaha memperoleh data mengenai subjek terkait secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang didasarkan pada peninjauan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Diperoleh dari sumber pertama yang berasal dari instansi/institusi yang berkaitan langsung dengan penelitian. Dalam hal ini data didapatkan dari pimpinan DPD Partai PKS, dan DPC PDI-P Kota Palembang.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung berupa catatan tentang adanya suatu peristiwa ataupun catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber data utama. Diperoleh dengan studi kepustakaan (*library research*) menggunakan data yang telah tersedia berupa bahan-bahan pustaka seperti: arsip atau dokumen partai, buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, Undang-Undang dan lain

sebagainya yang dianggap relevan dengan masalah rekrutmen politik yang dilakukan oleh masing-masing partai politik yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian tentunya membutuhkan data dan informasi yang lengkap dan akurat. Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk memperoleh data penelitian yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam mengambil beberapa data guna mendapatkan informasi ialah sebagai berikut:²³

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis yang diteliti. Dalam hal penulis menggunakan teknik pengumpulan data *observasi non participant*, yaitu teknik pengumpulan data yang mengamati langsung dan berhubungan langsung kepada subjek tetapi penulis tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.²⁴

b. Wawancara (*Interview*)

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2012). Hal. 224

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2014). Hal.146

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian interaksi antara pewawancara dan sumber informasi yang di wawancarai secara langsung.²⁵ Wawancara dilakukan penulis dengan berbagai pihak yang bersangkutan dengan masalah yang sedang diteliti guna mengumpulkan data-data secara maksimal. Dan penulis terlebih dahulu menentukan beberapa informan kunci sebagai data. Informan kunci yaitu orang yang di anggap lebih mengerti dan mengetahui serta memahami pokok permasalahan yang akan di gali. Dalam hal ini, wawancara untuk mendapatkan informasi terkait mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai PKS dan Partai PDI-P, penulis berencana akan memfokuskan wawancara pada pimpinan DPC Partai PDI-P, dan DPD Partai PKS kota Palembang.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan dokumen resmi melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik. Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong,²⁶ dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data

²⁵A. Yusuf Muri, *Metodologi penelitian kualitatif kuantitatif dan penelitian gabungan* (Jakarta: kencana, 2014). Hal. 372

²⁶Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung:Remaja Rosda karya,2004). Hal.206

dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Data-data yang akan penulis gunakan disini adalah data yang berhubungan dengan rekrutmen politik masing-masing partai seperti, data calon kandidat, prosedur rekrutmen politik yang ditetapkan masing-masing partai, persyaratan dalam rekrutmen politik, data kandidat atau calon, dan data lain yang dianggap penting dan berhubungan dengan pola rekrutmen politik yang dilakukan masing-masing partai.

5. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di kantor Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jl. Letnan Murod, Srijaya Kec. Alang-Alang Lebar kota Palembang, Sumatera Selatan. Dan kantor DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jl. Radial 24 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan karena penulis ingin fokus pada mekanisme rekrutmen politik partai DPC PDIP-P dan DPD PKS. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah :

- a. Dikarenakan belum adanya penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian di atas khususnya di kota Palembang.
- b. Terjangkaunya lokasi penelitian oleh peneliti, baik dari segi tenaga, dana maupun segi efisiensi waktu.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah *comparative analysis* atau analisis perbandingan, yakni penelitian untuk mendeskripsikan secara obyektif dan sistematis pola perbandingan antara dua fenomena politik yang terjadi dalam

satu waktu. Tipe analysis dalam penelitian ini adalah *comparative analysis* dalam studi kasus (*Case Studies*). Jadi studi ini merupakan *comparative analysis* secara deduktif yang berangkat dari sejumlah teori tentang mekanisme rekrutmen yang telah tersusun dalam studi-studi sebelumnya, dengan studi kasus yang terjadi di DPD PKS dan DPD PDI-P Kota Palembang.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penguraian masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini maka sistem pembahasan akan dikemas dalam lima bab. Adapun sistematika pembahasan, yakni sebagai berikut:

Bab I Merupakan Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian yang digunakan dalam Sistematika Penulisan Skripsi. Pembahasan dalam bab ini merupakan penjelasan pokok mengenai apa yang menjadi bahasan bab-bab selanjutnya dan mencerminkan kerangka berpikir penelitian.

Bab II Merupakan Landasan Teori yang digunakan sebagai acuan landasan teori yang mendukungnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Rekrutmen Partai Politik dan Teori Kelembagaan Partai Politik.

Bab III Merupakan Deskripsi Objek Penelitian. Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah DPD PKS dan DPC PDI-P yang bertempat di kota Palembang.

Bab IV Merupakan Analisis Data. Pada Bab ini berisi tentang analisis data yang berhubungan dengan Rekrutmen Politik Calon Legislatif Partai PKS dan PDI-P dalam Pemilu Legislatif 2014 di kota Palembang, Bagaimana mekanisme rekrutmen caleg DPD PKS dan PDI-P dalam pileg 2014 kota Palembang, Faktor pendukung dan penghambt rekrutmen politik dalam pileg 2014 kota Palembang.

Bab V Merupakan Kesimpulan dan Saran-saran. Dalam simpulan Penulis akan menyimpulkan tentang Mekanisme Rekrutmen Caleg DPD PKS dan PDI-P kota Palembang dalam Pemilu Legislatif 2014 dan Faktor pendukung dan penghambt rekrutmen politik dalam pileg 2014 kota Palembang.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Partai Politik

Sebelum beranjak pada pengertian partai politik, maka perlu memahami maksud dari politik itu sendiri. Dari pemahaman yang beragam, penulis melihat politik sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Hal-hal yang menyangkut kekuasaan dalam masyarakat yakni sifat, hakikat, dasar, proses, ruang lingkup dan hasil-hasil kekuasaan.²⁷ Jadi ilmu politik disimpulkan sebagai yang memusatkan perhatian pada perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, mempengaruhi pihak lain, ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan. Pandangan fungsionalisme menyatakan bahwa politik merupakan kegiatan para elit politik dalam mempengaruhi pemerintah, membuat dan melaksanakan kebijakan umum (*who gets what, when and how*) diantara para ilmuwan yang menggunakan kacamata pandangan ini adalah David Easton dan Harold Lasswell. Sehingga bisa disimpulkan bahwa politik itu bersifat mempelajari kekuasaan, beserta sifat

²⁷Ramlan,Surbakti.1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Hal: 5

dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tidak resmi (elit politik dan lain-lain).²⁸

Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi nilai dan cita-cita yang sama.²⁹ Kelompok ini bertujuan untuk meraih kekuatan politik dan merebut kedudukan politik. Ada beberapa definisi partai politik yang diberikan para ilmuwan politik. *Carl Friedrich* memberikan batasan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil dan idil kepada para anggotanya.³⁰

Sigmund Neumann dalam buku karyanya, "*Modern Political Parties*", mendefinisikan Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Sederhananya, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.

Menurut *Giovanni Sartori*, partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu, mampu

²⁸Ramlan. *Ibid.* hal:4-6

²⁹Mirriam, Budiarjo. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Jakarta. Hal: 161

³⁰*Ibid.* hal: 116

menempatkan calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Pengertian yang lebih lengkap di kemukakan oleh *Marx N Hagoapian*, menurutnya partai politik adalah suatu organisasi yang di bentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologi tertentu melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.

B. Rekrutmen Partai Politik

Dalam partai politik terdapat beberapa fungsi penting yang dijalankan partai sebagai sarana dalam mengaplikasikan tujuan mereka. Salah satu fungsi partai politik yang terkait dengan ini adalah rekrutmen partai politik.³¹

Rekrutmen merupakan suatu proses untuk mencari dan menyeleksi anggota untuk kegiatan regenerasi dari sebuah organisasi, baik partai politik, lembaga pemerintahan maupun organisasi lainnya. Namun, rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa politik seperti yang terdapat dalam buku *Dasar-Dasar Ilmu Politik* yang menyebutkan: “...proses mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai...”³²

Istilah rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa perpolitikan, dan kemudian diadopsi oleh partai politik seiring dengan kebutuhan partai akan dukungan kekuasaan dari rakyat, dengan cara mengajak dan turut serta dalam keanggotaan

³¹Amal, Ichlasul. 1996. *Edisi Teori-teori Mutakhir Partai Politik Edisi Revisi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta. Hal: 28

³²Mirriam,Budiarjo.2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Jakarta. Hal: 164

partai tersebut. Rekrutmen sendiri memiliki acuan waktu dalam prosesnya, maka pada saat itu pula rekrutmen dilakukan pada saat partai memerlukan. Pendapat lainnya yang mengemukakan pengertian rekrutmen politik oleh Ramlan Surbakti dalam buku *Memahami Ilmu Politik* yang dimaksud rekrutmen politik adalah:

“Seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya, dengan mengkhususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat yang cukup menonjol, partai politik menyeleksi dan menempatkannya sebagai seorang calon pemimpin”³³

Rekrutmen politik partai dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai ajang untuk mencari dan menyeleksi keanggotaan baru untuk diikutsertakan dalam partai politik sebagai pembelajaran politik, disamping untuk melakukan regenerasi dalam partai politik tersebut maka dilakukan melalui mekanisme yang diterapkan oleh partai. Pengaruh rekrutmen politik sangat menentukan dalam regenerasi kehidupan partai. Hal itu dikarenakan partai memerlukan penyegaran keanggotaan untuk dapat bertahan dalam mempertahankan kekuasaan politiknya dimata masyarakat.

C. Pola Rekrutmen Partai Politik

Pola merupakan corak, model, system, cara kerja, bentuk (struktur yang tetap dan rencana). Pola rekrutmen adalah konstansi berbagai praktek rekrutmen oleh partai politik. Pada dasarnya setiap partai harus berprinsip untuk terbuka bagi

³³Ramlan,Surbakti.1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Hal: 118

kelompok sosial manapun, namun pada level partikis. Kerap kali sulit dihindari bahwa tiap kecenderungan tipe partai menstrukturkan perbedaan dalam menatap konsep rekrutmen yang dianggap ideal bagi partainya.³⁴

Adapun mekanisme rekrutmen politik partai yang dikemukakan oleh *Rush dan Althoff* adalah: "...proses perekrutan politik memiliki dua sifat yaitu: (1) sifat tertutup; adalah suatu sistem perekrutan administratif yang didasarkan atas patronase. (2) sifat terbuka; adalah sistem yang berdasarkan pada ujian-ujian terbuka".³⁵

Proses perekrutan partai memiliki sifat khusus dalam tafsirannya, misalnya untuk perekrutan administratif diperlukan suatu dasar *patronase* (lindungan) dalam proses perekrutannya, dalam arti faktor kedekatan seseorang dapat dijadikan acuan untuk memperoleh pengaruh terutama ketika proses pemilihan pemimpin partai. Rekrutmen politik meliputi aspek: subyek politik dalam arti manusia, dan obyek politik dalam arti partai politik. Rekrutmen politik partai dapat dilakukan dengan cara-cara yang diinginkan partai baik secara terbuka maupun tertutup.

Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang direkrut adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat di butuhkan untuk suatu jabatan politik. Setiap partai juga memiliki pola rekrutmen yang berbeda.

³⁴I Ketut Putra Erawan, Riswanda Imawan dkk.2010. *Draft Modul Organisasi dan Manajemen Kepartaian: Bab I Manajemen Sumberdaya Manusia Politik*. Hal: 17

³⁵*Ibid*

Sistem rekrutmen politik menurut *Rush dan Althoff* dibagi menjadi dua cara. *Pertama* rekrutmen terbuka, yakni dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga Negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses dengan syarat-syarat yang telah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional. Dimana setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi. *Kedua*, rekrutmen tertutup yaitu adanya kesempatan untuk masuk menduduki jabatan politik tidaklah sama setiap warga negara artinya hanya individu-individu tertentu yang dapat menduduki jabatan politik.³⁶

Penelitian tentang perbandingan rekrutmen politik Partai PKS dan PDI-P kota Palembang. Dalam penelitian ini penulis mengambil indikator dari *Michael Rush dan Phillip Althof*, dalam penjelasan tahapan rekrutmen politik pemimpin. Maka penulis dalam melakukan penelitian ini merumuskan operasionalisasi konsep Perbandingan Rekrutmen Politik Calon Legislatif PKS dan PDI-P kota Palembang pada tahun 2014 sebagai berikut:

- 1) Penyediaan rekrutmen politik terhadap Caleg, merupakan tahapan awal yang dilakukan Partai PKS dan PDI-P dalam pengrekrutan Caleg melalui:
 - a. Mekanisme rekrutmen Caleg yang dilakukan Partai.
 - b. Waktu dan tempat pelaksanaan rekrutmen Caleg.
 - c. Sarana rekrutmen Caleg.

³⁶*Ibid.* hal:242

2). Kriteria rekrutmen politik pemimpin, syarat/kriteria Caleg oleh kedua partai dielaborasi dengan kriteria untuk memilih dan menetapkan calon legislatif oleh *Richard.S Katz dan William Crotty*, antara lain yaitu :³⁷

- a. Usia, dimana seorang calon haruslah memiliki usia yang cukup yakni 21 tahun untuk dapat dicalonkan menjadi anggota legislatif. Usia adalah hal yang penting karena dapat menentukan tingkat analisa seseorang dalam menghadapi masalah. Biasanya faktor usia juga dapat mengukur kematangan dan pengalaman seseorang dalam masyarakat.
- b. Popularitas, yakni seorang calon adalah orang yang dikenal masyarakat luas dan memiliki reputasi yang baik.
- c. Pendidikan, yaitu seorang calon anggota legislatif harus mempunyai tingkat pendidikan yang bagus minimal sarjana agar calon tersebut dapat memahami dan mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.
- d. Keuangan dan finansial, hal ini adalah suatu syarat yang juga dianggap penting, seorang calon anggota legislatif haruslah mempunyai dana yang cukup besar yang digunakan ketika mengadakan kampanye.
- e. Akseptabilitas, yakni penerimaan masyarakat terhadap seorang calon anggota legislatif. Penerimaan ini akan muncul ketika

³⁷Hesel Nogi Tangkilisan,2003, *Kebijakan Publik yang Membumi*, Yogyakarta :Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia. Hal:188

masyarakat merasa calon tersebut adalah orang-orang yang benar-benar dapat menyuarakan kepentingannya.

f. Kapabilitas, yakni kemampuan untuk menyerap aspirasi masyarakat, kemudian merumuskan aspirasi tersebut terhadap bentuk pernyataan yang jelas dan menyampaikan hasil rumusan itu kepada masyarakat.

3). Kontrol rekrutmen politik Caleg, merupakan peran yang dilakukan DPD Partai PKS dan DPC Partai DPI-P dalam mengontrol jalannya rekrutmen Caleg. Adapun pelaksanaan kontrol rekrutmen politik dilakukan pada:³⁸

a. Bakal calon Legislatif dari internal partai.

b. Bakal calon Legislatif dari eksternal partai.

D. Kelembagaan Partai Politik

Konsep mengenai pelembagaan partai politik oleh *Vicky Randall dan Lars Svasand*. Dengan merujuk dari beberapa dimensi pelembagaan partai politik yang dikemukakan oleh Huntington, Panebianco, dan Kenneth Janda, Vicky Randall dan Lars Svasand merumuskan bahwa :³⁹

“Pelembagaan partai politik dipahami sebagai proses pematapan partai politik baik dalam wujud perilaku yang memola maupun dalam sikap atau budaya”

Lebih lanjut keduanya mengelompokkan pelembagaan partai menjadi 4 (empat) dimensi, yaitu sebagai berikut :

³⁸*Ibid*

³⁹Samuel P Hutington, *Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Masa*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003)

Dimensi Kepartaian	<i>Internal</i>	<i>Eksternal</i>
<i>Structural</i> (Struktural)	<i>Systemness</i> (Kesisteman)	<i>Decisional autonomy</i> (Otonomi Keputusan)
<i>Attitudinal</i> (Kultural)	<i>Value infusion</i> (Identitas Nilai)	<i>Reification</i> (Citra pada Publik)

Proses pelebagaan ini mengandung dua aspek, aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Bila kedua dimensi ini dipersilangkan, maka akan tampak sebuah tabel empat sel, yaitu (1) derajat kesisteman (*systemness*) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan struktural, (2) derajat identitas nilai (*value infusion*) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan kultural, (3) derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*) sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan struktural, dan (4) derajat pengetahuan atau citra publik (*reification*) terhadap suatu partai politik sebagai persilangan aspek eksternal dengan kultural.

1. Derajat Kesisteman (*Systemness*)

Yang dimaksudkan dengan kesisteman adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur, dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik. AD/ART partai politik dirumuskan secara komprehensif dan rinci sehingga mampu berfungsi sebagai kaidah dan prosedur penuntun perilaku dalam melaksanakan semua fungsi partai politik. Suatu partai politik dapat

dikatakan sudah melembaga dari segi kesisteman bila partai politik melaksanakan fungsinya semata-mata menurut AD/ART yang dirumuskan secara komprehensif dan rinci itu.⁴⁰ Derajat kesisteman suatu partai bervariasi menurut: (a) asal-usul partai politik, yaitu apakah dibentuk dari atas, dari bawah, atau dari atas yang disambut dari bawah; (b) siapakah yang lebih menentukan dalam partai: seorang pemimpin yang disegani atau pelaksanaan kedaulatan anggota menurut prosedur dan mekanisme yang ditetapkan organisasi sebagai suatu kesatuan; (c) siapakah yang menentukan dalam pembuatan keputusan: fraksi-fraksi dalam partai ataukah partai secara keseluruhan; dan (d) bagaimana partai memelihara hubungan dengan anggota dan simpatisan, yaitu apakah dengan klientelisme (pertukaran dukungan dengan pemberian materi) atau menurut konstitusi partai (AD/ART).⁴¹

2. Identitas Nilai (*Value Infusion*)

Identitas nilai berkaitan dengan orientasi kebijakan dan tindakan partai politik menurut ideologi atau platform partai. Identitas nilai seperti ini tidak hanya tampak pada pola dan arah kebijakan yang diperjuangkan partai politik tetapi juga tampak pada basis sosial pendukungnya. Lapisan sosial atau golongan masyarakat memberi dukungan kepada suatu partai karena mengidentifikasi orientasi politiknya dengan ideologi atau platform partai itu. Karena itu derajat identitas nilai suatu partai politik berkaitan dengan (a) hubungan partai dengan kelompok populis tertentu (*popular bases*), yaitu apakah suatu partai politik mengandung dimensi sebagai gerakan sosial yang

⁴⁰*Ibid*

⁴¹*Ibid*

didukung kelompok populis tertentu, seperti buruh, petani, dunia usaha, kelas menengah, komunitas agama tertentu, komunitas kelompok etnik tertentu, dan (b) pengaruh klientelisme dalam organisasi, yaitu apakah hubungan partai dengan anggota cenderung bersifat instrumental (anggota selalu mengharapkan *tangible resources* berupa materi dari partai) ataukah lebih bersifat ideologis (anggota mengenal dan mengharapkan partai bertindak berdasarkan identifikasi terhadap ideologi partai).⁴²

Suatu partai politik dapat dikatakan telah melembaga dari segi identitas nilai bila partai itu telah memiliki lapisan sosial atau golongan masyarakat sebagai pendukung loyal (basis sosial) karena pola dan arah kebijakan yang diperjuangkannya dan bila dukungan yang diberikan kepada partai itu bukan semata-mata karena menerima materi tertentu dari partai tetapi karena orientasi politiknya sesuai ideologi atau platform partai itu. Partai politik yang mempunyai basis sosial pendukung yang spesifik niscaya akan memiliki identitas nilai yang jelas. Selain itu karena ideologi partai belum dijabarkan dalam bentuk pola dan arah kebijakan publik yang diperjuangkan, maka perbedaan di antara partai politik itu baru tampak secara simbolis. Karena itu, masih sukar mengategorikan basis sosial pendukung setiap partai politik di Indonesia.⁴³

3. Derajat Otonomi (*Decisional Autonomy*)

⁴²Ari, Dwipayana. *Memperkuat Pelembagaan Partai Politik*. (Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila.2012).

⁴³Ari, Dwipayana. *Memperkuat Pelembagaan Partai Politik*. (Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila. 2012)

Derajat otonomi suatu partai politik dalam pembuatan keputusan berkait dengan hubungan partai dengan aktor luar partai, baik dengan sumber otoritas tertentu (penguasa, pemerintah), maupun dengan sumber dana (pengusaha, penguasa, negara atau lembaga luar), dan sumber dukungan massa (organisasi masyarakat). Pola hubungan suatu partai dengan aktor di luar partai dapat berupa: (a) hubungan ketergantungan kepada aktor luar, (b) hubungan itu bersifat saling tergantung (*interdependen*), dan (c) hubungan itu berupa jaringan (*linkage*) yang memberi dukungan kepada partai. Suatu partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi otonomi partai bila keputusan partai politik itu tidak didikte pihak luar tetapi diputuskan sendiri dengan atau tanpa konsultasi dengan aktor luar yang menjadi mitra atau jaringan pendukung partai itu. Suatu partai akan memiliki otonomi dalam pembuatan keputusan bila dana untuk membiayai kegiatan partai berasal dari iuran anggota, kontribusi pengurus, dan aktivis di luar iuran.

4. Pengetahuan Publik (*Reification*)

Derajat pengetahuan publik tentang partai politik merujuk pertanyaan apakah keberadaan partai politik itu telah tertanam pada imajinasi publik seperti dimaksudkan partai politik itu. Yang menjadi isu utama di sini bukan terutama tentang sikap masyarakat mengenai partai politik umumnya, tetapi tentang corak dan kiprah masing-masing partai politik bagi masyarakat. Bila sosok dan kiprah partai politik tertentu telah tertanam pada imajinasi publik seperti dimaksudkan partai itu, maka pihak lain baik individu maupun lembaga di masyarakat akan menyesuaikan aspirasi dan harapannya atau

sikap dan perilaku mereka dengan keberadaan partai politik itu. Suatu partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi pengetahuan publik bila masyarakat umum mendefinisikan sosok dan kiprah partai politik itu sesuai identitas nilai (platform) partai itu sehingga masyarakat pun dapat memahami (meski belum tentu setuju) mengapa suatu partai politik melakukan jenis tindakan tertentu dan tidak melakukan jenis tindakan lain. Harus dibedakan secara jelas antara mengetahui sosok dan kiprah suatu partai sesuai yang dimaksudkan partai itu dengan sikap setuju atau tidak setuju terhadap sosok dan kiprah partai itu.⁴⁴

Derajat pengetahuan publik ini merupakan fungsi dari waktu dan kiprah partai itu. Makin tua umur suatu partai politik makin jelas definisi atau pengetahuan publik mengenai partai itu. Makin luas dan mendalam kiprah suatu partai dalam percaturan politik, makin mudah bagi kalangan masyarakat untuk mengetahui sosok dan kiprah partai politik itu.

Dimensi pelembagaan partai yang dikemukakan oleh *Randall dan Svasand* inilah yang kemudian menjadi rujukan dalam penelitian. Alasannya didasarkan bahwa konsep pelembagaan yang diuraikan oleh mereka merupakan hasil perpaduan dari konsep pelembagaan partai yang dikemukakan oleh para ahli.

⁴⁴ *Ibid*

BAB III

GAMBARAN UMUM DPD PKS DAN DPC PDIP KOTA PALEMBANG

A. Deskripsi Partai Keadilan Sejahtera kota Palembang

1. Profil Partai Keadilan Sejahtera

Fenomena munculnya PK (Partai Keadilan) pada 1998 yang berganti nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) pada 2002, adalah peristiwa unik dan menarik berhubung telah memberikan warna dan harapan baru bagi pergerakan Islam politik di Indonesia. Pertama, PKS lahir dari gerakan Tarbiyah. Gerakan Tarbiyah sendiri awalnya lebih berfokus sebagai gerakan dakwah yang muncul di awal 1980-an di era Orde Baru. Gerakan ini dibawa oleh para alumni pemuda Indonesia yang belajar di Perguruan Tinggi Islam di Timur Tengah dan

merupakan hasil dari interaksi mereka dengan ideologi Ikhwanul Muslimin di Mesir yang didirikan oleh Hasan Al-Banna.⁴⁵

Tokoh-tokoh pelopor gerakan Ikhwanul Muslimin di Indonesia yaitu Hilmi Aminuddin, Salim Segaf Al-Jufri, Abdullah Said Baharmus, dan Acep Abdul Syukur. Gerakan tarbiyah sendiri mengambil basis gerakannya di masjid-masjid Universitas di Indonesia. Tokoh yang memelopori gerakan tarbiyah di kampus dan merupakan tokoh dari DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia) yaitu Ir. Imamuddin Abdul Rahim yang memprakarsai pola pengkaderan model Ikhwanul Muslimin yang dikenal dengan *usrah/halaqah/liqo'at*. Gerakan ini berawal dari Masjid Salman ITB (Institut Teknologi Bandung) yang kemudian menyebar ke universitas lainnya.⁴⁶

Pada era orde baru, Gerakan *Tarbiyah* bisa difahami sebagai alternatif dari berbagai gerakan Islam saat itu. Perlu diketahui bahwa penguasa orde baru saat itu melakukan represi (hambatan) terhadap aktivitas umat Islam dalam bidang politik. Dibubarkannya Masyumi tahun 1970 merupakan bukti bahwa rezim orde baru tidak mengizinkan Islam secara politik tampil ke publik yang berpotensi menjadi lawan pemerintah. Kemudian diterapkannya asas tunggal Pancasila sebagai landasan dari semua organisasi yang ada saat itu, yang mengakibatkan sebagian dari umat Islam mengalami penindasan dan tekanan politik yang kuat.⁴⁷

Jatuhnya rezim orde baru dibawah pimpinnan Soeharto dan beralih ke era reformasi, dengan menguatnya tuntutan rakyat yang menghendaki perubahan

⁴⁵Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS Suara dan Syariah*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), Hal 5

⁴⁶*Ibid*, Hal. 34

⁴⁷*Ibid*, Hal. 32

disegala bidang kehidupan terutama kehidupan politik yang mensyaratkan kebebasan rakyat untuk mendapatkan hak politiknya yang selama ini telah terkerdilkan oleh kekuasaan otoriter pemerintahan orde baru. Maka, membuka peluang bagi Gerakan Tarbiyah untuk memperjuangkan dan mengekspresikan idealisme dan cita-cita gerakan mereka keruang publik. Hal ini dibuktikan dengan munculnya partai baru yaitu Partai Keadilan (PK).

Partai Keadilan (PK) merupakan sebuah partai politik berasaskan Islam di Indonesia.⁴⁸ Partai Keadilan (PK) didirikan pada 20 Juli 1998 dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (Ketua) partai adalah Nurmahmudi Isma'il. Pada 20 Oktober 1999 Partai Keadilan menerima tawaran kursi Kementerian Kehutanan dan Perkebunan dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, dan menunjuk Nurmahmudi Isma'il (saat itu presiden partai) sebagai calon menteri. Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden partai dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000. Pada 3 Agustus 2000 Delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al-Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945.⁴⁹

Dengan dinyatakan lolos verifikasi, Partai Keadilan (PK) pertama kali ikut dalam pemilu 1999 dan meraih 1,36% suara, dengan menduduki peringkat ke 7 dari 48 partai peserta pemilu. Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan partai politik pada pemilu

⁴⁸Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera Bab I Pasal 2, Hal. 2

⁴⁹*Ibid*, Hal 38

selanjutnya (*electoral threshold*) yaitu 2%, maka Partai Keadilan harus merubah namanya untuk dapat ikut kembali pada pemilu berikutnya.⁵⁰ Dengan berbagai proses dan tahapan pada akhirnya partai ini bermetamorfosis menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Perubahan ini ternyata membawa sukses besar bagi PKS yang meraih simpati publik atas usaha dan kerja keras pendahulunya, PKS berhasil membangun citra positif dimata publik dengan mengalirnya dukungan luas dari publik terhadap PKS. Pemilu 2004 menjadi lompatan *electoral* bagi PKS yang menempatkannya tidak lagi sebagai partai gurem tetapi kini telah bergeser menjadi partai tengah yang kekuatannya layak untuk diperhitungkan. Pada pemilu 2004 PKS berhasil menempatkan 45 orang kadernya sebagai wakil rakyat di DPR dengan perolehan 7.34% suara. Pada pemilu 2009, PKS berhasil memperoleh 7,9% suara dengan masih 57 kursi di DPR.⁵¹ Dan pemilu 2014, PKS memperoleh 6,67% suara dengan meraih 40 kursi di DPR.

2. Deskripsi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kota Palembang

Partai Keadilan Sejahtera adalah salah satu partai Islam yang masih eksis di Indonesia khususnya di kota Palembang sampai saat ini. Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera di kota Palembang sendiri, sama halnya dengan PKS secara umum yang merupakan partai lanjutan dari Partai Keadilan (PK) yang lahir pada era reformasi tahun 1998. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

⁵⁰Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam : Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), Hal. 221

⁵¹Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam : Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), Hal. 223-224

menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Provinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Partai ini adalah salah satu partai yang menggunakan asas Islam sebagai asas partainya dan partai yang menyatakan dirinya sebagai partai dakwah serta dikenal juga sebagai partai kader yang mempunyai militansi dan loyalitas kader yang kuat.

Untuk pengurus PKS di tingkat daerah kabupaten/kota disebut DPD (Dewan Pengurus Daerah). Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera kota Palembang berlokasi di Jalan Letnan Murod Kecamatan Ilir Timur I Km. 5 Palembang, Sumatera Selatan. Terbentuknya Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera kota Palembang yaitu sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi umat Islam khususnya dan seluruh masyarakat di kota Palembang. Adapun Ketua Umum DPD PKS kota Palembang saat ini adalah M. Ridwan Saiman, SH, MH.⁵²

3. Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera

Visi Partai Keadilan Sejahtera adalah *”Terwujudnya Masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat”*⁵³. Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan; menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan

⁵²M. Ridwan Saiman (Ketua DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 26 April 2019

⁵³Anggran Dasar Partai Keadilan Sejahtera

demokratis; dan bergotong-royong menjaga kedaulatan Negara. Pengertian genuine dari masyarakat madani itu perlu dipadukan dengan konteks masyarakat Indonesia dimasa kini yang merealisasikan Ukhuwah Islamiyyah (ikatan keislaman), Ukhuwwah (kemanusiaan), dalam bingkai NKRI.⁵⁴

Adil adalah kondisi dimana entitas dan kualitas kehidupan baik pembangunan politik, ekonomi, hukum, dan sosial-budaya ditempatkan secara proporsional dalam ukuran yang pas dan seimbang, tidak melewati batas. Itulah sikap moderat, suatu keseimbangan yang terhindar dari jebakan dua kutub ekstrem: mengurangi dan melebihi (ifrath dan tafrith).

Sejahtera secara standar berarti aman dan makmur. Aman adalah situasi kemanusiaan yang terbebas dari rasa takut, secara psikis sejahtera, sedangkan makmur adalah situasi kemanusiaan yang terbebas dari rasa lapar, secara fisik sejahtera. Bermartabat menuntut bangsa Indonesia untuk menempatkan dirinya sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang mampu menampilkan dirinya, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, maupun budaya secara elegan sehingga memunculkan penghormatan dan keaguman dari bangsa lain. Martabat muncul dari akhlak dan budi pekerti yang baik, mentalitas, etos kerja dan akhirnya bermuara pada produktivitas dan kreativitas. Kreativitas bangsa yang tinggi dapat mewujudkan dalam karya-karya adiluhung dalam berbagai bidang yang tak ternilai. Dari sana muncul rasa bangga pada diri sendiri dan penghormatan dari bangsa lain. Martabat memunculkan rasa

⁵⁴Anggran Dasar Partai Keadilan Sejahtera Bab II Pasal 5

percaya diri yang memungkinkan kita berdiri sama tegak, dan tidak didikte oleh bangsa lain.⁵⁵

Misi yang diemban Partai Keadilan Sejahtera adalah :⁵⁶

- a. Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintah dan birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi. Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas.⁵⁷

Melanjutkan reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskannya pada posisi fungsional, untuk membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien. Penegakan hukum yang diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif. Mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan industri pertahanan nasional.

Mengembangkan otonomi daerah yang terkendali serta berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga-lembaga kenegaraan ditingkat pusat, provinsi dan daerah. Menegaskan

⁵⁵Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera, 2008), Hal. 1

⁵⁶ Anggran Dasar Partai Keadilan Sejahtera

⁵⁷ Anggran Dasar Partai Keadilan Sejahtera Bab II Pasal 6

kembali sikap bebas dan aktif dalam mengupayakan stabilitas kawasan dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya.⁵⁸

- b. Mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, melalui strategi pemerataan pendapatan, pertumbuhan bernilai tambah tinggi, dan pembangunan berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, kelautan; meningkatkan daya saing industry nasional dengan pendalaman struktur & upgrading kemampuan teknologi; dan pembangunan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru berbasis resources & knowledge. Semua itu dilaksanakan diatas landasan (filosofi) ekonomi egaliter yang akan menjamin kesetaraan atau valuasi yang sederajat antara (pemilik) modal dan (pelaku) usaha, dan menjamin pembatasan tindakan spekulasi, monopoli, dan segala bentuk kriminalitas ekonomi yang dilakukan oleh penguasa modal dan sumber-sumber ekonomi lain untuk menjamin terciptanya kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha.
- c. Menuju pendidikan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun sistem pendidikan nasional terpadu, komprehensif dan bermutu untuk menumbuhkan SDM yang

⁵⁸Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera, 2008), Hal. 2

berdaya saing tinggi serta guru yang professional dan sejahtera. Menuju sehat paripurna untuk semua, dengan visi sehat badan, mental-spritual, dan sosial sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT untuk membangun bangsa dan negara; dengan mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh potensi untuk mendukung pelayanan kesehatan berkualitas. Mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis dan religious sebagai faktor penentu dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh, disiplin, beretos kerja kokoh, serta berdaya inovasi dan berkeaktivitas tinggi. Terciptanya masyarakat sejahtera, melalui pemberdayaan masyarakat yang dapat mewedahi dan membantu proses pembangunan yang kontinue.⁵⁹

4. Jenjang Keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera adalah partai kader, dimana inti dari kekuatan partai ini berasal dari para kader-kadernya. Sesuai dengan AD-ART PKS Bab IV Pasal 9 yaitu, setiap warga Negara Indonesia dapat menjadi anggota partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan Reublik Indonesia yang berlaku. Sistem kaderisasi pada PKS berjenjang sesuai dengan tingkat kualitas dan loyaritas kadernya, adapun tingkatannya adalah :⁶⁰

- a. Anggota kader pendukung/terbina adalah mereka yang terlibat aktif mendukung setiap kegiatan kepartaian, yang terdiri :
 - 1) Kader Pemula, yaitu mereka yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota partai dan terdaftar dalam keanggotaan partai

⁵⁹*Ibid*

⁶⁰Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera Bab IV Pasal 9, Hal. 3-4

- yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKS setelah lulus mengikuti Training Orientasi Partai.
- 2) Kader Muda, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan telah lulus pada pelatihan kepartaian tingkat dasar pertama.
- b. Anggota kader inti adalah anggota yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan kepartaian.
- 1) Kader Madya, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh DPD dan telah lulus pada pelatihan kepartaian tingkat dasar kedua.
 - 2) Kader Dewasa, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan telah lulus pada pelatihan kepartaian tingkat lanjut.
 - 3) Kader Ahli, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang telah lulus pada pelatihan kepartaian tingkat tinggi.
 - 4) Kader Purna, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh DPP dan telah lulus pada pelatihan Kepartaian tingkat ahli.
- c. Kader Kehormatan, yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.⁶¹

⁶¹Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera Bab IV Pasal 9, Hal. 3-4

Untuk ditetapkan sebagai calon tokoh yang akan mengisi jabatan politik maupun jabatan struktural partai, seorang kader harus melewati proses pelatihan dan pengembangan kader secara formal. Adapun jenis-jenis pelatihan kepartaian dan pengembangan kader di Partai Keadilan Sejahtera yaitu :

Training Orientasi Partai (TOP) 1 yaitu para calon anggota partai diberikan pemahaman awal mengenai struktur kepartaian, sejarah serta eksistensi sepanjang perjalanan PKS. Setelah mengikuti TOP 1 ini, anggota partai secara resmi menyandang status sebagai *anggota pemula terdaftar*, yang juga dapat segera memiliki kartu anggota partai. Dalam tahap selanjutnya, seorang yang telah lulus dalam TOP 1 ini akan dibina dalam forum yang lebih intim lagi, yakni melalui Taklim Rutin Partai (TRP) yang formatnya merupakan pengajian rutin, serta pendalaman materi-materi keIslaman yang kelak dipimpin oleh seorang *murabbi* (guru).

Training Orientasi Partai (TOP) 2 yaitu seorang anggota pemula terdaftar yang telah cukup mumpuni dan layak bagi *murrabi* akan direkomendasikan untuk mengikuti jenjang pengkaderan selanjutnya. Peserta yang telah melalui jenjang pengkaderan TOP 2 ini berhak menyandang status sebagai *anggota pemula terbina* yang memiliki kewajiban untuk mengikuti beberapa serangkaian kegiatan tambahan partai, yakni Taklim Rutin Kader (TRK), Pelatihan-Pelatihan Kepartaian (PPK), serta Kegiatan Internal Partai (KIA).

Training Dasar (TD) 1, dan TD 2. Prasyarat untuk dapat menjalankan TD 1, seorang anggota pemula harus telah mendapatkan sebuah keterangan berupa Surat Kelulusan Anggota Pemula/Kartu Tanda Anggota Pemula (SKAP/KTAP). Bagi anggota pemula yang dinyatakan lulus dalam TD 1, maka statusnya berubah menjadi seorang *anggota muda*. Kegiatan anggota muda lainnya, selain TRK, PPK, dan KIA, yakni mengikuti Kajian Ilmu Sosial 1 (KISP 1), setelah dinyatakan cukup kompeten oleh *murabbi* untuk menjalani jenjang pengkaderan berikutnya, yakni TD 2. Maka seorang anggota muda akan kembali direkomendasikan sang *murabbi* untuk menjalani TD 2. Lulusan dari TD 2 ini akan menyandang predikat *anggota madya*.⁶²

Training Lanjutan 1 yaitu seorang anggota madya yang telah lulus dalam TL 1 berhak mendapatkan status baru, yakni sebagai *anggota dewasa*. Setelah dinyatakan lulus dan menyandang gelar anggota dewasa, maka alur pengkaderan selanjutnya yakni menjalani Training Lanjutan (TL) 2. Seorang yang tengah, dan telah dinyatakan lulus dari TL 2 ini akan memperoleh gelar sebagai *anggota ahli*.

Selanjutnya alur pengkaderan tertinggi di PKS, adalah Training Manajemen dan Kepemimpinan Sosial (TMKS). TMKS dapat diikuti oleh seorang anggota ahli yang hendak menaikkan jenjang keanggotaannya di PKS menjadi seorang anggota purna. Selain anggota purna yang merupakan jenjang pengkaderan tertinggi di PKS, ada juga status anggota

⁶²*Ibid*

kehormatan yang dapat diperoleh tanpa melalui proses kaderisasi. Anggota kehormatan ini dapat disematkan oleh pengurus partai kepada seorang kader yang dirasa telah memiliki sumbangsih besar, serta figur ketokohnya yang dianggap dapat dijadikan panutan dalam tubuh internal partai.⁶³

Melalui proses pengkaderan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kader yang memiliki karakter, mental, pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dilandasi oleh iman dan taqwa yang diwujudkan dalam perilaku dengan dasar moralitas agama. Secara spesifik pengkaderan PKS bertujuan untuk memberikan pemahaman Islam kepada anggotanya; meningkatkan kualitas jati diri, intelektualitas, profesionalisme, kesungguhan, kemampuan antisipasi ke masa depan dan kepekaan sosial serta kepemimpinan yang berwibawa ; memperkokoh komitmen PKS terhadap negara, wawasan kebangsaan yang dilandasi iman dan taqwa; mempertebal mental perjuangan dan mewujudkan reformasi total menuju masyarakat Indonesia baru; meningkatkan semangat berkorban, rasa tanggungjawab dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat secara keseluruhan; dan membangun kader secara berkesinambungan.

5. Struktur Organisasi Partai Keadilan Sejahtera

⁶³Linggar Kharisma Suseno, “*Pola Afiliasi Informal Organisasi Gerakan Mahasiswa dengan Partai Politik*”, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas FISIP, Universitas Diponegoro, Hal. 12-15

- a. Struktur organisasi partai ditingkat pusat; yaitu Majelis Syura, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, Dewan Syariat Pusat.
- b. Struktur organisasi partai ditingkat Provinsi, yaitu Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Syariat Wilayah.
- c. Struktur organisasi partai ditingkat Kabupaten/kota, yaitu Dewan Pengurus Daerah (DPD).
- d. Struktur organisasi partai ditingkat Kecamatan yaitu Dewan Pengurus Cabang (DPC).
- e. Struktur organisasi partai di tingkat Kelurahan/desa yaitu Dewan Pengurus Ranting(DPRa)
- f. Selain struktur organisasi diatas, partai membentuk unit pembinaan dan pengkaderan anggota.⁶⁴

6. Struktur Organisasi Partai Keadilan Sejahtera di kota Palembang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera kota Palembang, jumlah seluruh kader PKS kota Palembang sebanyak 2413 orang yang terdiri dari 707 laki-laki dan 1706 perempuan. Jumlah seluruh pengurus di Partai Keadilan Sejahtera kota Palembang periode 2015-2020 sebanyak 121 pengurus, diantara anggota pengurus Majelis Pertimbangan Daerah yang berjumlah 6 orang, Pengurus Dewan Syariah Daerah berjumlah 7 orang, dan Dewan Pengurus Daerah berjumlah 109 orang dengan 7 biro dan 12 bidang di

⁶⁴Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera Bab VI Pasal 13, Hal. 5

Partai Keadilan Sejahtera.⁶⁵ 16 DPC sudah terbentuk dengan baik sementara struktur DPRa belum terbentuk.⁶⁶

Tabel. 2
Majelis Pertimbangan Daerah (MPD)

NO	NAMA	AMANAHA (JABATAN)
1	Subagio Rachmad Sentosa, SH	Ketua
2	H. M. Anwar Al Syadat, S. Si	Sekretaris
3	A.Hamzah Ramadhan	Komisi Organisasi Dan Kewilayahan
4	A.M Ikhsan, S.Ag, M.Ag	Komisi Pendidikan Dan Kebudayaan
5	Azzam Hardi	Komisi Kebijakan Publik
6	H. Hariyanto, SH, M. Hum	Komisi Kajian Strategis

Sumber: SK-DPD partai keadilan sejahtera kota Palembang periode 2015-202

Tabel. 3
Dewan Syariah Daerah (DSD)

NO	NAMA	AMANAHA (JABATAN)
1	Musliman, S.Ag	Ketua
2	Indra Jaya, S.Ag	Sekretaris
3	Yahya Noprizal, Lc, Mpl	Lajnah Hisbah
4	Januar Doniansa, Lc	Lajnah Bayan
5	Amin Rahman, Lc	Lajnah Tadrib
6	H. Andi Sanjaya, Lc	Lajnah Keumatan
7	Sobarna, Lc	Lajnah Dirosat Dan Buhuts

Sumber: SK-DPD partai keadilan sejahtera kota Palembang periode 2015-2020

Tabel. 4
Dewan Pengurus Daerah (DPD)

NO	NAMA	AMANAHA (JABATAN)
1	M. Ridwan Saiman, SH, MH	Ketua Umum
2	Hj. Yulfa Cindo Sari, A.Md	Wakil Ketua Umum
3	Jumono, ST	Sekretaris Umum
4	Darussalam, SH	Wakil Sekretaris Umum

⁶⁵M. Ridwan Saiman (Ketua DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 26 April 2019

⁶⁶Laporan Kerja DPD PKS kota Palembang periode 2015-2020

5	Wais Al Qurni, ST	Biro Organisasi, Kinerja dan Administrasi
6	Willy Cauza, ST	Biro IT, Wilayah Data Dan Layanan Informasi
7	Leo Antrayopi, S.Pd	Biro Personalia Dan Kerumahtangaan
8	Yuliadi, SP	Biro Protokol Dan Team Support Ketua Umum
9	Eka Erfanie, S.Si	Bendahara Umum
10	Hasbi, SE	Wakil Bendahara Umum
11	A. Ipit Hakim, SE	Biro Akuntansi Dan Keuangan
12	Ahmad Al Fatih, SE	Biro Pengelolaan Aset
13	Lilik Kurniawan, A.Md	Biro Sosial Dan Kesejahteraan Anggota
14	Amril Sudiono, ST	Ketua Bidang Kaderisasi
15	Yopi Irawan, SE	Sekretaris Bidang Kaderisasi
16	Wisnu Ardiyanto, S.TP	Anggota Bidang Kaderisasi
17	Irfan Budi Kustanto, S.TP	Anggota Bidang Kaderisasi
18	Haidar Kamil, SE	Anggota Bidang Kaderisasi
19	Yudha	Anggota Bidang Kaderisasi
20	A. Halla	Anggota Bidang Kaderisasi
21	Julihardi, S.T	Ketua Bidang Pemberdayaan Sdm & Lembaga Profesi
22	Muhammad Jalal	Sekretaris Bidang Pemberdayaan Sdm & Lembaga Profesi
23	Drg. Dani Aerosta	Anggota Bidang Pemberdayaan Sdm & Lembaga Profesi
24	Abu Nada, ST	Anggota Bidang Pemberdayaan Sdm & Lembaga Profesi
25	Dr. Dian Renuati	Anggota Bidang Pemberdayaan Sdm & Lembaga Profesi
26	Muhammad Jasa, S. Pd	Ketua Bidang Kepemudaan
27	Amran Marhamid, S.Pd.I	Sekretaris Bidang Kepemudaan
28	Ahmad Riyadi, ST	Bagian Kepeloporan Mahasiswa
29	Junaidi, S.Kep, Ners	Bagian Kepeloporan Mahasiswa
30	Fathan, S. Si	Bagian Pembinaan Tunas Bangsa
31	Mgs. Ronald Riski	Bagian Pembinaan Tunas Bangsa
32	Reni Andriyani	Bagian Pembinaan Tunas Bangsa
33	Rosalina	Bagian Pembinaan Tunas Bangsa
34	Syawal	Bagian Pemuda Religi
35	A. Affan Zaidan,S.Kom	Bagian Pemuda Kreatif dan Seni Budaya
36	Andriko, ST	Bagian Pemuda Kreatif dan Seni Budaya
37	Ahmad Kamil	Bagian Pemuda Kreatif dan Seni Budaya
38	Nani Syahriani, S.Si	Bagian Pemuda Kreatif dan Seni Budaya
39	Ahmad Wafa,SP	Ketua Bidang Kepanduan & Olahraga
40	Pangki Pramono	Sekretaris Bidang Kepanduan & Olahraga
41	Ifik Ismudjati	Anggota Bidang Kepanduan & Olahraga
42	Ahmad Sukri, S.Pd	Anggota Bidang Kepanduan & Olahraga
43	Sulis	Anggota Bidang Kepanduan & Olahraga
44	Dedi Kurniawan	Anggota Bidang Kepanduan & Olahraga
45	Eva Susanti	Anggota Bidang Kepanduan & Olahraga
46	Indra Gunawan	Anggota Bidang Kepanduan & Olahraga
47	Dwi Yanni Suswati, ST	Ketua Bidang Perempuan & Ketahanan Keluarga
48	Lestari Hidayati, S.Pd	Sekretaris 1 Bidang Perempuan & Ketahanan Keluarga
49	Hani'atus Solikhah, M.Pd	Sekretaris 2 Bidang Perempuan & Ketahanan Keluarga
50	Fitri Damayanti, SE	Bagian Perempuan
51	Tinah Rusmiati, S.Pd	Bagian Perempuan
52	Asuswati	Bagian Perempuan
53	Lilik Kusdiantari, SP	Bagian Ketahanan Keluarga
54	Tanzimah, M.Pd	Bagian Ketahanan Keluarga
55	Beti Meileni, S. Pd	Bagian Ketahanan Keluarga
56	Yuyun Wirdasari, S.Si	Bagian Ketahanan Keluarga
57	Sita Holipah, S.P	Bagian Kajian Perempuan, Keluarga Dan anak

58	Fitri Rahmi, Lc	Bagian Kajian Perempuan, Keluarga Dan anak
59	Ellda, S.Pd	Bagian Kajian Perempuan, Keluarga Dan anak
60	Hidayani, S.Pd	Bagian Hubungan Lembaga Perempuan
61	Fatmawati, A.Md	Bagian Hubungan Lembaga Perempuan
62	Mery Hartati, A.Md	Bagian Hubungan Lembaga Perempuan
63	Irpan Sanjaja, ST	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dan Pemilikada
64	Awiruddin, S. Pd	Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Dan Pemilikada
65	Sulton Amna, ST, MT	Anggota Bidang Pemenangan Pemilu Dan Pemilikada
66	Faisal, S.Si	Anggota Bidang Pemenangan Pemilu Dan Pemilikada
67	Yanwar Rusman, ST	Anggota Bidang Pemenangan Pemilu Dan Pemilikada
68	Enny Hidajati, SS, MM	Anggota Bidang Pemenangan Pemilu Dan Pemilikada
69	Misrakandi, S.Pd, M. Si	Anggota Bidang Pemenangan Pemilu Dan Pemilikada
70	A. Zafa	Anggota Bidang Pemenangan Pemilu Dan Pemilikada
71	Iskandar	Anggota Bidang Pemenangan Pemilu Dan Pemilikada
72	Irwan Syahputra, SP	Ketua Bidang Hubungan Masyarakat
73	Willy Causa, ST	Sekretaris Bidang Hubungan Masyarakat
74	Salman Alfarisi	Anggota Bidang Hubungan Masyarakat
75	Bobby Sofyan, SH. M.Kn	Ketua Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan
76	Sayuti Rambang, SH	Sekretaris Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan
77	Else Suhaimi, SH	Anggota Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan
78	Admansyah	Anggota Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan
79	Alip Dian Pratama	Anggota Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan
80	Aang Fitriyansyah	Anggota Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan
81	H. M. Taufik Saiman, S.Ag	Ketua Bidang Pembangunan Keumatan Dan Dakwah
82	H. M. Rasyid Redho Pratama, Lc, MESY	Sekretaris Bidang Pembangunan Keumatan Dan Dakwah
83	Supriyadi, SS	Anggota Bidang Pembangunan Keumatan Dan Dakwah
84	Kusworo Nursiddiq, Lc	Anggota Bidang Pembangunan Keumatan Dan Dakwah
85	Eliya	Anggota Bidang Pembangunan Keumatan Dan Dakwah
86	Salamunnah, S. Th. I	Anggota Bidang Pembangunan Keumatan Dan Dakwah
87	Ilham Noval	Anggota Bidang Pembangunan Keumatan Dan Dakwah
88	Mohammad Iqbal, SE	Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat
89	Dadang Patrajaya	Sekretaris Bidang Kesejahteraan Rakyat
90	Budi Santosa	Anggota Bidang Kesejahteraan Rakyat
91	Sulthoni	Anggota Bidang Kesejahteraan Rakyat
92	Busro Iskandar	Anggota Bidang Kesejahteraan Rakyat
93	Sulikhah	Anggota Bidang Kesejahteraan Rakyat
94	Supriyadi, S. Pd	Anggota Bidang Kesejahteraan Rakyat
95	Dimin Trihandini	Anggota Bidang Kesejahteraan Rakyat
96	H. Dian Eko Prasetyio, S.Kom	Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha Dan Ekonomi Kader
97	Deni Triyono, ST	Sekretaris Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha Dan Ekonomi Kader
98	Anton Junaidi	Bagian Data Dan Informasi Jaringan Usaha Kader
99	Reza Novaron, ST	Bagian Data Dan Informasi Jaringan Usaha Kader
100	Kartini	Baian Diklat
101	Rahmi Hidayati	Baian Diklat
102	Heri Santoso	Bagian Pemberdayaan Jaringan Usaha Dan Ekonomi
103	Muhammad Hibbani	Bagian Pemberdayaan Jaringan Usaha Dan Ekonomi
104	Hardiansyah, SP	Bagian Pemberdayaan Jaringan Usaha Dan Ekonomi
105	Ahmad Hafidz	Ketua Bidang Pekerja, Petani Dan Nelayan
106	Yusuf Romandi	Sekretaris Bidang Pekerja, Petani Dan Nelayan
107	D Putro	Anggota Bidang Pekerja, Petani Dan Nelayan

108	Abu Fauzan	Anggota Bidang Pekerja, Petani Dan Nelayan
109	Mulyadi, ST	Anggota Bidang Pekerja, Petani Dan Nelayan

Sumber: SK-DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang periode 2015-2020

B. Deskripsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kota Palembang

1. Sejarah Munculnya Partai PDI-Perjuangan

Sejarah awal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) adalah sebagai hasil fusi dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan murba pada 10 Januari 1973 menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yang dalam perkembangannya menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) pada tanggal 1 Februari 1999 menjadikan kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai jati diri partai; serta gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah dan terbuka sebagai watak partai.⁶⁷

Selain nama, PDI Perjuangan juga mengubah logo kepala banteng dalam segilima menjadi banteng gemuk dalam lingkaran. Indonesia yang demokratis dihayati oleh PDI Perjuangan berupa adanya kesamaan hak antar warga negara secara utuh tanpa melihat latar belakang. Bahkan PDI Perjuangan yakin akan kehilangan roh kepartaiannya bila masih mempermasalahkan daerah, suku, agama dan latar belakang lainnya. Sebagai partai yang mempunyai roh kedaulatan rakyat, PDI Perjuangan dicirikan oleh adanya pengakuan dan penghargaan terhadap demokrasi kebangsaan dan keadilan sosial. Demokrasi menempatkan kekuasaan

⁶⁷Cornelis lay, *Melawan Negara PDI 1973-1986* (Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2010) Hal. 12-16.

tertinggi di tangan rakyat yang diwujudkan melalui kedaulatan anggota partai dan diselenggarakan sepenuhnya melalui kongres partai.

Keberadaan partai politik tidak pernah terlepas dari adanya peraturan-peraturan yang menjadi landasan partai politik untuk hidup dan melangkah di dunia politik. Selain adanya peraturan perundang-undangan berkaitan dengan partai politik yang dibuat pemerintah, PDI Perjuangan juga membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) partai yang digunakan sebagai pedoman intern partai.

Berkaitan dengan asas, jatidiri, dan watak dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) tertulis dalam Bab II Pasal 5 Ayat (1), (2) dan (3) Anggaran Dasar PDI Perjuangan, yaitu sebagai berikut.⁶⁸

1. Partai bersaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai jiwa dan semangat lahirnya pada 1 Juni 1945.
2. Jatidiri partai adalah kebangsaan, kerakyatan, dan Keadilan Sosial.
3. Watak Partai adalah gotong royong, demokratis merdeka, pantang menyerah dan terbuka.

Berkaitan dengan tugas, fungsi dan tugas dari PDI Perjuangan diatur dalam Anggaran Dasar PDI Perjuangan pada Bab III Pasal 6 sampai dengan Pasal 9. Pasal 6 mengatur tentang tujuan umum partai, yaitu sebagai berikut.

⁶⁸AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bab 11 Pasal 5 Ayat 1, 2, dan 3

1. Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang dasar negara republik indonesia tahun 1945
2. Membangun masyarakat pancasila 1 juni 1945 dalam negara kesatuan republik indonesia yang merdeka,bersatu, berdaulat,adil dan makmur.

Pasal 7 mengatur tentang tujuan khusus partai, yaitu sebagai berikut.⁶⁹

1. Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat.
2. Memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara demokratis, dan
3. Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁷⁰

Pasal 8 mengatur mengenai fungsi partai, yaitu sebagai berikut.

1. Menjadi alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa.
2. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggungjawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

⁶⁹AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bab 11 Pasal 5 Ayat 1, 2, dan 3

⁷⁰AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bab 11 Pasal 5 Ayat 1, 2, dan 3

3. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Menghimpun, membangun, dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat pancasila, dan
5. Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara.

Pasal 9 mengatur mengenai tugas partai, yaitu sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam negara kesatuan republik indonesia.
2. Melaksanakan, mempertahankan, dan menyebarluaskan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
3. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik partai.
4. Memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan negara.
5. Mempersiapkan kader partai dalam pengisian jabatan politik dan jabatan publik melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
6. Mempengarui dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa.⁷¹

Dalam Piagam Perjuangan PDI Perjuangan tahun 2010-2015, dikatakan bahwa arah politik dan program PDI Perjuangan pertama-tama adalah menjadikan dirinya sebagai kekuatan perekat bangsa yang menjamin tegaknya Negara

⁷¹*Ibid*

Kesatuan Republik Indonesia dengan segala cita-cita luhurnya serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang bertanggungjawab, berkeadilan, bersih, dan berwibawa. Penuntasan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang diikuti oleh perjuangan untuk mewujudkan adanya supremasi dan tegaknya hukum, pembagian, dan pembatasan kekuasaan yang memungkinkan berjalannya prinsip keseimbangan dan kesetaraan, dan berjalannya pengawasan politik dan sosial merupakan agenda pokok PDI Perjuangan yang harus diwujudkan oleh setiap kader dan anggota PDI Perjuangan.

Dalam keberadaannya, PDI perjuangan juga memiliki platform. Platform adalah pernyataan sekelompok orang atau partai tentang prinsip atau kebijakan partai. Dalam tulisannya tentang *PDI Perjuangan Langkah Menuju Reformasi Total*, memaparkan bahwa “dengan tegas, PDI Perjuangan mendasarkan platform politiknya pada upaya pembentukan pemerintahan yang berdasarkan pada asa keadilan dan wibawa hukum.”

Sebagai Partai Ideologis berasaskan Pancasila 1 Juni 1945, PDI perjuangan berperan aktif dalam usaha-usaha untuk mencapai cita-cita luhur bersama yaitu membangun dan mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta berkeadaban dan berketuhanan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk itu, PDI Perjuangan berketetapan menjadi alat perjuangan dan pengorganisasian rakyat. Sebagai alat

rakyat, PDI Perjuangan bertugas untuk:⁷² *Pertama*, mewujudkan amanat penderitaan rakyat sebagaimana termaktub dalam cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945. *Kedua*, menjaga dan melaksanakan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar dan arah berbangsa dan bernegara; sebagai sumber inspirasi dan harapan bagi rakyat; sebagai norma pengatur tingkah laku kebijakan, kelembagaan dan anggota partai; dan sebagai cermin dari keseluruhan jatidiri partai. *Ketiga*, mengantarkan Indonesia untuk berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai syarat-syarat minimum bagi perwujudan cita-cita bersama di atas.

Dalam perjalanan pada pemilihan umum pasca Orde Baru, PDI Perjuangan selalu berada pada posisi lima besar dalam perolehan suara terbanyak. Seperti pada pemilu tahun 1999 PDI Perjuangan memperoleh peringkat pertama untuk suara DPR dengan memperoleh 151 kursi. Pada pemilu 2004 perolehan suara PDI Perjuangan memperoleh peringkat kedua, dengan 109 kursi. Sedangkan dalam pemilu 2009 PDI Perjuangan mendapat 93 kursi di DPR dan menempati posisi ketiga dalam perolehan suara serta kursi di DPR.⁷³

2. Visi dan Misi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

Bahwa sesungguhnya cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta berkeadaban dan berketuhanan sebagaimana tercantum dalam

⁷²Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2010-2015.

⁷³<http://wikipedia/Partai-Demokrasi-Indonesia-Perjuangan.htm.com>

pembukaan UUD 1945 merupakan cita-cita bersama dari seluruh rakyat Indonesia.⁷⁴

Visi

- a) Mewujudkan amanat penderitaan rakyat sebagaimana tercantum dalam cita-cita Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.
- b) Menjaga dan melaksanakan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar dan arah berbangsa dan bernegara, sebagai sumber inspirasi dan harapan bagi rakyat, sebagai norma pengatur tingkah laku kebijakan, kelembagaan dan anggota partai dan sebagai cerminan dari keseluruhan jati diri partai.
- c) Mengantarkan Indonesia untuk berdaulat dalam bidang politik, berdirikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai syarat-syarat minimum bagi perwujudan cita-cita bersama bangsa.

Misi

- a) Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- b) Membangun masyarakat Pancasila 1 Juni 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
- c) Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat.
- d) Memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya secara demokratis dan berjuang mendapatkan

⁷⁴Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

kekuasaan politik secara konstiusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Menjadi alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa.

- e) Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
- f) Menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- g) Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat Pancasila.
- h) Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara.

3. Identitas Partai

Sejak UU nomor 3 dan nomor 8 tahun 1985 diberlakukan bagi sebagian kalangan disebut sebagai “tahap awal pembaharuan politik di Indonesia”, maka di negara ini tidak lagi berideologi yang lain kecuali

ideologi Pancasila. Ketentuan itu muncul sebab kedua undang-undang tersebut menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal bagi semua orospol dan ormas.⁷⁵

Dalam praktek, bila diamati dari tingkah laku politik selama pemilu 1977, 1982 dan 1987, PDI seakan-akan “menggambil alih” identitas yang dimiliki PNI, misalnya dari segi lambang partai, PDI menggunakan gambar kepala banteng sebagaimana yang pernah dipakai oleh PNI (meskipun dalam bentuk yang berbeda). Begitu dalam identitas warna (merah dan hitam) dan simbol-simbol (seperti Bung Karno), semua menimbulkan kesan bahwa PDI adalah penjelmaan dari PNI. Atribut partai itu dapat dimengerti mengingat PNI merupakan unsur yang paling dominan didalam tubuh PDI, terutama terlihat dari hasil perbandingan dari jumlah suara yang diraih kelima partai (PNI, Parkindo, Partai Katholik, IPKI dan Murba) pada pemilu 1971 atau 2 tahun sebelum mereka berfusi kedalam PDI. Selain itu, sejarah politik di Indonesia, pada pemilu 1955 menyatakan PNI pernah tercatat sebagai parpol yang terbesar.⁷⁶

Meskipun demikian, satu hal yang sulit dibantah dengan menampilkan anggota keluarga Bung Karno, yaitu Megawati Soekarnoputri dan Guruh Soekarnoputra dalam kampanye pemilu, maka PDI sebenarnya secara sengaja berusaha membangkitkan kembali simpati masyarakat kepada Bung Karno tentu saja terlepas dari apakah partisipasi anggota keluarga Bung Karno dapat atau tidak ditafsirkan sebagai upaya membangkitkan kembali Soekarnoisme atau sebagaimana telah disinggung sekedar memanfaatkan tokoh kharismatik

⁷⁵Adriana Elisabeth Sukamto, dkk., *PDI dan Prospek Pembangunan Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 1991) Hal. 1-3

⁷⁶*Ibid.* Hal. 69-70

Bung Karno untuk tujuan-tujuan politik sesaat. Dalam kaitan dengan masalah identitas partai ini terdapat beberapa kemungkinan yang memberikan peluang bagi PDI.

Pertama, yang menonjolkan dimensi Persatuan Indonesia; sila ketiga dari Pancasila sebagai identitas partai. Dimensi ini masih mempunyai kaitan erat dengan paham nasionalisme, namun kecil kemungkinannya bagi munculnya kecurigaan terhadap mereka yang pernah mendukung dari 2 unsur partai nasrani.

Kedua, yang menonjolkan dimensi sila keempat (kerakyatan) sebagai identitas partai. Dimensi ini sesuai dengan apa yang tampaknya menjadi program utama PDI, yaitu demokratisasi, sebagaimana tercermin dari motto kampanye pada pemilu 1987: "Pancasila Identitasku, Demokrasi Programku, Indonesia Wawasanku". Dimensi sila kerakyatan juga sesuai dengan nama partai, yakni Partai Demokrasi Indonesia.

Ketiga, yang menonjolkan dan mengembangkan dimensi sila kelima (keadilan sosial). Dimensi ini sesuai dengan komitmen PDI terhadap kepentingan rakyat kecil. Sebagaimana diketahui, selama ini PDI selalu mengidentifikasikan sebagai "partai rakyat kecil". Pengidentifikasian semacam itu terbukti cukup berhasil sebagai salah satu sarana penarik masa, khususnya golongan masyarakat "kelas bawah" pada masa kampanye pemilu 1987.⁷⁷

Keempat, yang menonjolkan dan mengembangkan dimensi sosio-nasional-demokrasi sebagai identitas partai. Dengan kata lain penonjolan ini

⁷⁷Adriana Elisabeth Sukamto, dkk., *PDI dan Prospek Pembangunan Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 1991) Hal. 1-3

merupakan penggabungan dari dimensi-dimensi sila Persatuan Indonesia, sila kerakyatan dan sila keadilan sosial. Kenyataan ini juga sesuai dengan keterangan yang pernah dicoba dirumuskan PDI sebagai “identitas” partai, yaitu bahwa PDI berwatak dan bercirikan demokrasi Indonesia, kebangsaan Indonesia dan keadilan sosial.⁷⁸

4. Tabel Struktur, Komposisi dan Personalia DPC PDIP Kota Palembang Periode 2015-2020

No	Nama	Jabatan
1.	Ir. H. Zulfikri Kadir	Ketua
2.	H. Darmawan, SH	Wakil ketua bidang kehormatan
3.	M. Firmansyah Hasan, SE, MM	Wakil ketua bidang kaderisasi
4.	Ir. Misobah M. Sahil	Wakil ketua bidang organisasi
5.	Ir. H. Alex Andonis	Wakil ketua bidang kemenangan pemilu
6.	H. Eddy Saad, SH, MM	Wakil ketua bidang komunikasi Politik dan agitasi propaganda
7.	Hagmar Bandama, SH	Wakil ketua bidang politik hukum dan keamanan
8.	Hendra Wijaya, ST	Wakil ketua bidang maritime
9.	Riska Edith Susani	Wakil ketua bidang pembangunan manusia, kebudayaan dan pariwisata
10.	H. M. Ali Sya'ban, SH	Wakil ketua bidang ekonomi
11.	Setia Budi Irawan	Wakil ketua bidang nelayan, buruh dan petani
12.	Hj. Intim Solachma, SH	Wakil ketua bidang perempuan dan anak
13.	Alimudin, SH	Wakil ketua bidang pemuda dan olahraga
14.	Ir. Neni Indriani	Wakil ketua bidang komunitas seni budaya
15.	M. Aidil Adhari, ST	Sekretaris
16.	Yandris Suandi, SE	Wakil sekretaris bidang internal
17.	Ayu Nur Suri, SE, MM	Wakil sekretaris bidang program
18.	Fitriyanti Agustinda, SH	Bendahara
19.	Ahmad Darwin	Wakil bendahara bidang investasi dan kekayaan

Sumber: SK-DPC Partai PDIP Kota Palembang Periode 2015-2020

BAB IV

⁷⁸Ibid, Hal. 73-74

MEKANISME REKRUTMEN CALEG DPD PKS DAN DPC PDIP KOTA PALEMBANG

A. Rekrutmen Politik Calon Legislatif DPD PKS Kota Palembang

Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik tergantung pada kualitas rekrutmen politik. Rekrutmen politik menurut Ramlan Surbakti adalah mencakup pemilihan, seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Sedangkan menurut Suharno, rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik, termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik.⁷⁹

Ada dua macam mekanisme rekrutmen politik, yaitu rekrutmen yang terbuka dan tertutup. Dalam model rekrutmen terbuka, semua warga negara yang memenuhi syarat tertentu (seperti kemampuan, kecakapan, umur, keadaan fisik, dsb) mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam lembaga negara/pemerintah. Suasana kompetisi untuk mengisi jabatan biasanya cukup tinggi, sehingga orang-orang yang benar-benar sudah teruji saja yang akan berhasil keluar sebagai pemenangnya.

⁷⁹Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 1999), Hal. 25

Ujian tersebut biasanya menyangkut visinya tentang keadaan masyarakat atau yang di kenal sebagai platform politiknya serta nilai moral yang melekat dalam dirinya termasuk integritasnya. Sebaliknya, dalam sistem rekrutmen tertutup kesempatan tersebut hanya bisa dinikmati oleh sekelompok kecil orang. Ujian oleh masyarakat terhadap kualitas serta integritas tokoh masyarakat biasanya sangat jarang dilakukan, kecuali oleh sekelompok kecil elite itu sendiri.⁸⁰

Sistem perekrutan politik terdiri dari beberapa cara :⁸¹

- 1) Seleksi pemilihan melalui ujian
- 2) Latihan (training) Kedua hal tersebut menjadi indikator utama didalam perekrutan politik.
- 3) Penyortiran atau penarikan undian (cara tertua yang digunakan di Yunani kuno).
- 4) Rotasi memiliki tujuan mencegah terjadinya dominasi jabatan dari kelompok-kelompok yang berkuasa maka perlu adanya pergantian secara periode dalam jabatan-jabatan politik.
- 5) Perebutan kekuasaan dengan menggunakan atau mengancam dengan kekerasan. Cara ini tidak patut dicontoh karena untuk menjadi seorang pemimpin tidaklah harus melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji karena kita telah dididik dengan baik dan harus menerapkan teknik-teknik yang baik pula dalam berpolitik.

⁸⁰Liliy Romli, *Pilkada Langsung, Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal*, Jakarta: Jurnal Analisis CSIS 34, No.3, 2005, Hal. 19

⁸¹Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung* (Semarang: Pustaka Pelajar, 2005) Hal. 203

- 6) Petronag artinya suatu jabatan dapat dibeli dengan mudah melalui relasi-relasi terdekat. Petronag masih memiliki keterkaitannya dengan budaya korupsi.
- 7) Koopsi (pemilihan anggota-anggota baru) artinya memasukan orang-orang atau anggota baru untuk menciptakan pemikiran yang baru sehingga membawa suatu partai pada visi dan misi yang ditujunya.

Jalur-jalur politik dalam rekrutmen politik :⁸²

1. Jalur koalisi partai atau pimpinan-pimpinan partai artinya koalisi-koalisi partai merupakan bagian terpenting di dalam rekrutmen politik karena sebagian besar kesepakatan dan pengangkatan politik di adopsi dari hasil koalisi-koalisi antarpartai yang berperan dalam suatu lingkup politik. Artinya rekrutmen politik tidak terlepas dari peranan koalisi partai.
2. Jalur rekrutmen berdasarkan kemampuan-kemampuan dari kelompok atau individu artinya jalur ini menjadi kriteria dasar dalam perekrutan seseorang karena dinilai dari berbagai segi yaitu kriteria-kriteria tertentu, distribusi-distribusi kekuasaan, bakat-bakat yang terdapat di dalam masyarakat, langsung tidak langsung menguntungkan partai politik.
3. Jalur rekrutmen berdasarkan kaderisasi artinya setiap kelompok-kelompok partai harus menyeleksi dan mempersiapkan anggota-anggotanya yang dianggap mampu dan cakap dalam mendapatkan jabatan-jabatan politik yang lebih tinggi jenjangnya serta mampu

⁸² *Ibid.*, hal 200-203.

membawa memobilisasi partai-partai politiknya sehingga memberi pengaruh besar dikalangan masyarakat.

4. Jalur rekrutmen politik berdasarkan ikatan promodial. Di zaman modern ini jalur rekrutmen promodial tidak menutup kemungkinan terjadi di dunia politik. Fenomenal itu terjadi karena adanya hubungan kekerabatan yang dekat antara orang perorangan yang memiliki jabatan politik sehingga ia mampu memindah tangankan atau memberi jabatan tersebut kepada kerabat terdekatnya yang dianggap mampu dan cakap dalam mengemban tugas kenegaraan. Fenomena ini dikenal dengan nama “rekrutmen politik berdasarkan ikatan promodial”.⁸³

Pola rekrutmen politik terdiri dari rekrutmen terbuka dan tertutup. Rekrutmen terbuka adalah di mana syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit.

Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka adalah:

1. Mekanismenya demokratis
2. Tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki

⁸³ *Ibid.*, hal 200-203.

3. Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi
4. Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi.

Sedangkan rekrutmen tertutup adalah berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit mempengaruhi legitimasinya.⁸⁴

PKS (Partai keadilan Sejahtera) sendiri melakukan rekrutmen politik dengan dua cara, yakni *rekrutmen fardi dan jama'i*. *Rekrutmen fardi* adalah rekrutmen yang dilakukan oleh anggota Tarbiyah terhadap satu atau dua orang dengan pendekatan pribadi atas inisiatif sendiri atau atas rekomendasi seorang murrabbi. Rekrutmen ini dilakukan dengan cara seseorang anggota Tarbiyah mencari calon peserta Tarbiyah, dimana calon tersebut kemudian dikondisikan melalui tahap tahap, antara lain: ta'aruf dan taqarrub.

Hasil dari upaya pemantauan ini kemudian dilaporkan, dibicarakan, dan dianalisis dalam forum halaqoh berdasarkan standar syarat-syarat peserta Tarbiyah. Jika memenuhi syarat maka ia akan diarahkan untuk mengikuti halaqoh Tarbiyah.

⁸⁴*Ibid*, hal 200-203

Jika kita lihat seksama tentang perekrutan fardi ini terdapat beberapa makna positif, salah satunya adalah suatu partai politik (PKS) bisa mendidik peserta didiknya melalui tahap kadersiasi Tarbiyah setelah direkrut. Proses Tarbiyah sendiri berjalan cukup lama dengan diberi bimbingan sekaligus pendidikan kader. Setelah berhasil melewati fase pendidikan Tarbiyah PKS bisa mendapatkan sebuah kader atau anggota yang royal dan berkontribusi bagus sesuai kriteria PKS sendiri.

Sementara *Rekrutmen jama'i* yakni rekrutmen yang dilakukan secara kolektif dengan cara formal dan informal. Pola rekrutmen ini bisa dilakukan dengan rekrutmen terhadap anggota masyarakat melalui kegiatan formal kepartaian untuk menjadi anggota dan simpatisan partai, Rekrutmen melalui pendaftaran peserta, sampai kepada rekrutmen melalui organisasi ekstrakurikuler di sekolah atau kampus. Dari perekrutan seperti ini akan melahirkan kader yang sudah menjadi kriteria PKS sendiri.⁸⁵

2. Metode Rekrutmen PKS DPD kota Palembang

Metode rekrutmen politik PKS di kota Palembang dilakukan dengan cara tertutup dan terbuka. Kedua metode bisa digunakan asalkan bakal caleg memenuhi syarat, namun sebenarnya PKS lebih mengutamakan dari kader ataupun bibit-bibit unggul dari organisasi sayap partai. Seperti hasil wawancara dengan Ketua Umum DPD PKS kota Palembang berikut ini:

⁸⁵Aulia Rahman (Tim Advokasi DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 26 April 2019

“Proses perekrutan politik PKS di kota Palembang melalui dua proses, bisa dengan proses terbuka dan tertutup.”⁸⁶

Menurut hasil wawancara dengan Bapak M. Ridwan mengatakan bahwa proses rekrutmen dari tubuh PKS ada yang melalui proses terbuka yaitu caleg tidak harus dari struktural misalnya simpatisan bisa jadi kader. Sedangkan, proses tertutup yaitu struktural yang mencari caleg baik dari luar ataupun dari dalam partai. Proses seleksi keduanya harus memenuhi beberapa syarat, seperti hasil wawancara dengan Bapak M. Ridwan : ⁸⁷

“Bahwa seleksi untuk menjadi caleg harus dilihat dari pemahaman tentang islam, memiliki popularitas yang bisa diterima oleh masyarakat luas”

Mengenai pernyataan di atas, bahwa caleg harus dilihat dari pemahaman tentang islam dapat dilihat dari sistem pengkaderan PKS dalam bentuk kegiatan tarbiyah. Dimana tarbiyah merupakan upaya membangun sosok pribadi muslim yang memahami dan menjalankan ajaran Islam secara menyeluruh dan integral. Kemudian membentuk pribadi yang bekerja mendakwahkan Islam dan pribadi yang memiliki kiprah nyata dalam bermasyarakat serta pribadi yang mampu turut berperan dalam mengelola negara.

Proses yang melalui kader jalur formal dan informal juga ikut andil dalam perekrutan di PKS, formal langsung direkrut oleh partai dan informal dari organisasi sayap yaitu mahasiswa (kammi), pemuda (gema keadilan), masyarakat (ikadi) dan remaja masjid yang kesemuanya harus mengikuti

⁸⁶M. Ridwan Saiman (Ketua DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 26 April 2019

⁸⁷*Ibid*

pembinaan dari partai melalui seminar dan diklat partai. Ada juga sistem rekrutmen yang bersifat individu yaitu pendekatan langsung kepada individu yang dinilai cocok dengan kriteria partai, kemudian bersifat kolektif yaitu partai menilai dengan mengadakan ieven-iven tertentu.

3. Indikator

Keanggotaan dan Sistem Kaderisasi partai PKS⁸⁸ Pasal 9

1. Setiap warga negara Indonesia dapat menjadi Anggota Partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
2. Partai menyelenggarakan rekrutmen dan kaderisasi Anggota.
3. Keanggotaan Partai terdiri atas Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan.
4. Anggota Biasa terdiri atas:
 - a) Anggota Pendukung, yaitu
 - (1) Anggota Terdaftar, dan
 - (2) Anggota Aktif.
 - b) Anggota Terbina, yaitu
 - (1) Anggota Pemula, dan
 - (2) Anggota Muda.
 - c) Anggota Inti, yaitu
 - (1) Anggota Madya,
 - (2) Anggota Dewasa,
 - (3) Anggota Ahli, dan

⁸⁸AD/ART Partai Keadilan Sejahtera

(4) Anggota Purna.

- 5). Setiap orang perseorangan yang berjasa terhadap Partai dan mengajukan permohonan kepada Partai dapat diangkat dan ditetapkan menjadi Anggota Kehormatan.

Pasal 10

Rekrutmen dan kaderisasi Anggota Biasa dilaksanakan dengan sistem dan mekanisme sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang secara sukarela mendaftarkan diri dan menyatakan persetujuannya terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai diangkat dan ditetapkan menjadi Anggota Pendukung;
- b) Setiap Anggota Pendukung yang setia mengikuti kegiatan dan pelatihan yang diselenggarakan Partai diangkat dan ditetapkan menjadi Anggota Terbina;
- c) Setiap Anggota Terbina yang setia mengikuti pembinaan dan kaderisasi yang diselenggarakan Partai diangkat dan ditetapkan menjadi Anggota Inti.⁸⁹

Partai Keadilan Sejahtera dalam melakukan upaya rekrutmen caleg melalui berbagai jenjang pengkaderan. Kurikulum kader yang dianut oleh PKS adalah kader pemula, kader muda, kader madya, kader dewasa, kader ahli dan kader purna. Jejang kader tersebut menentukan jabatan struktural. Dalam proses perekrutan caleg lebih digunakan perekrutan tertutup, meskipun PKS

⁸⁹AD/ART Partai Keadilan Sejahtera

juga menganut perekrutan dengan sistem terbuka. Para elite politik dari struktur partai yang mencari dan melakukan pendekatan terhadap calon yang dianggap berkompeten baik dari dalam maupun luar partai. Indikator dari calon yang bisa direkrut oleh partai adalah seperti yang dikatakan oleh Bapak M. Ridwan berikut :

“Kalau indikator dari masing-masing kandidat yang pasti memiliki pemahaman tentang islam, punya popularitas yang bisa diterima di masyarakat, untuk jadi anggota dewan minimal SMA, dan nanti tetap ada tim yang melakukan pemantauan terhadap perilaku sehari-hari dari calon itu.”⁹⁰

Menurut pernyataan diatas, dapat diketahui PKS berupaya untuk melakukan pemilihan caleg lebih dini kemudian penokohan caleg di masyarakat yang sesuai dengan kriteria partai. Sebagai partai kader, PKS mempunyai mekanisme tersendiri dalam pemilihan caleg diantaranya melalui pemilu internal. Dimana dalam proses penjaringan ini, kader masing-masing mengusulkan nama-nama kader dan nanti ada tim yang akan menjaringnya. Kemudian hasil dari penjaringan ini, akan diumumkan nama-nama yang layak dijadikan caleg.

4. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Rekrutmen Caleg PKS

Dalam perekrutan caleg PKS lebih terstruktur yaitu melalui kurikulum kader, tahapannya adalah kader pemula, kader muda, kader madya, kader dewasa, kader ahli, kader purna. Kader muda dan madya bisa mencapai satu

⁹⁰ M. Ridwan Saiman (Ketua DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 26 April 2019

dan dua tahun setelah itu bisa menduduki jabatan struktural. Bidang pembinaan kader dari murabi juga menjadi hal penting. Untuk menentukan para calon, selain itu tetap dilakukan pemantaun perilaku sehari-hari dari masing-masing individu yang tentunya didukung oleh proses jejang kader yang juga akan menentukan jabatan struktural, namun lamanya waktu bukan menjadi syarat mutlak. Keterangan ini

disampaikan oleh Bapak M. Ridwan seperti berikut ini :

“Kalau diambil dari kader kelebihannya kan ya sudah terbentuk, soalnya dari partai ada kurikulum yang jelas untuk bisa menjadi kader, mulai dari kader pemula sampai purna. Kalau prosesnya kurang jadinya butuh waktu lebih lama dan pemantauan harus terus dilakukan untuk mengetahui kualitas individunya”⁹¹

Pada prinsipnya proses perekrutan caleg PKS bisa terbuka dan juga tertutup dengan cara struktur yang mencari baik dari luar maupun dari dalam. Proses seleksi perekrutan tersebut melalui tes mengenai pemahaman tentang islam, selain itu punya popularitas yang bisa dikenal masyarakat juga merupakan faktor pendukung. Untuk menjadi anggota dewan diperlukan pendidikan minimal lulusan Sekolah Menengah Atas.

Kader partai bisa direkrut melalui jalur formal dan informal, jalur formal langsung direkrut oleh partai sedangkan jalur informal didapatkan melalui organisasi sayap yaitu mahasiswa (kammi), pemuda (gema keadilan), masyarakat (ikadi) dan remaja masjid. Partai juga mengadakan pembinaan

⁹¹ M. Ridwan Saiman (Ketua DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 26 April 2019

namun tidak menjadi hal yang wajib misalnya melalui seminar dan diklat. Sistem rekrutmen partai juga bisa melalui cara individu yaitu secara pesan individu tersebut langsung didekati, sedangkan secara kolektif dengan cara partai membuat even untuk melakukan pendekatan.

B. Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif PDI-P DPC kota Palembang

Mekanisme perekrutan caleg yang dilakukan oleh PDIP dengan cara membentuk tim penyaringan caleg, yaitu dibuka pendaftaran pencalegan bagi seluruh kader PDIP khususnya kader yang bisa mengikuti pencalegan ini adalah kader yang sudah mengikuti pendidikan kader. Jadi di dalam PDIP itu sendiri, pendidikan kader ini memiliki 3 tahap, yaitu:⁹²

- 1) Pendidikan Kader Pratama adalah pendidikan untuk caleg tingkat kabupaten kota.
- 2) Pendidikan Kader Madya adalah pendidikan untuk caleg tingkat provinsi.
- 3) Pendidikan Kader Utama adalah pendidikan untuk caleg tingkat RI

PDIP memprioritaskan caleg dari anggotanya sendiri, yaitu dengan dilakukannya pendidikan kader pratama. Apabila ada calon dari luar partai, maka calon tersebut harus mengikuti prosedur yang telah dibuat oleh PDIP. Apabila calon tersebut tidak mengikuti pendidikan kader, maka calon tersebut tidak bisa mengikuti pencalegan, karena itu adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh PDIP. Pendidikan kader yang telah dibuat oleh PDIP itu

⁹²Ir. Zulfikri Kadir (Ketua DPD PDIP kota Palembang), *Wawancara*, 24 April 2019

sendiri sudah terlaksana di 17 kabupaten kota, salah satunya adalah kabupaten Prabumulih.⁹³

Dari segi perekrutan anggota, PDIP sendiri sudah pasti merekrut dari tokoh agama, masyarakat dan adat. Selain itu PDIP juga memiliki beberapa sayap (organisasi), yaitu:⁹⁴

- 1) Bamusi (Baitul Muslim), anggotanya terdapat kyai-kyai yang berasal dari NU dan Muhammadiyah.
- 2) Repdem (Relawan Demokrasi Perjuangan), anggotanya berasal dari para aktivis.
- 3) BMI (Banteng Muda Indonesia), anggotanya berasal dari anak muda dan tokoh-tokoh muda.
- 4) TMP (Taruna Merah Putih), anggotanya adalah orang-orang yang mempunyai bakat seni.
- 5) GANTI (Gerakan Tani dan Nelayan), anggotanya adalah para petani dan nelayan.

Di Sumsel sendiri 3 sayap (organisasi) yang baru terbentuk, yaitu Bamusi, Repdem dan BMI. Karena yang 2 organisasi lain baru akan ditambahkan/dibentuk dari pusat. Dan organisasi-organisasi tersebut digunakan untuk pemenangan caleg, karena organisasi tersebut sudah dibuat sampai tingkat PAC.

PDIP secara strukturalisasi yaitu partai yang menggunakan demokrasi terpimpin. Jadi koordinasi antara pemimpin pusat dan daerah dilakukan secara

⁹³Ir. Zulfikri Kadir (Ketua DPD PDIP kota Palembang), *Wawancara*, 24 April 2019

⁹⁴*Ibid*

kolektif, vertikal dan tingkatannya dari DPC ke DPD, DPD ke DPP. Sebab itu adalah garis koordinasi, jadi DPC tidak bisa langsung koordinasi ke DPP karena sudah ada garis koordinasi yang telah ditetapkan. Koordinasi antara pimpinan pusat dan daerah pasti dilakukan setelah PDIP membentuk tim penyaringan, nama-nama yang masuk dalam penyaringan maka akan diusulkan ke DPP dan DPP mengeluarkan surat suara (SK) pencalegan tersebut. Jadi sifat dari DPD ini hanya menyaring calon-calon, sebaliknya dari DPC juga melakukan penyaringan sama seperti yang dilakukan oleh DPD.⁹⁵

Setelah DPC dan DPD melakukan penjarangan terhadap calon-calon yang telah dipilih, maka hasilnya akan diserahkan ke DPP pusat dan DPP pusat akan menentukan dengan menggunakan mekanisme yang sudah ada. Jadi aturannya setiap caleg harus mengikuti pendidikan terlepas dari syarat-syarat yang diatur oleh Undang-Undang. Pendidikan Kader Pratama adalah pendidikan yang memang dilakukan PDIP yang sudah melalui tahapan badan diklat. Jadi, di PDIP ada badan khusus yang mengurus/menangani masalah pendidikan, yaitu badiklat (badan pendidikan kaderisasi).

Jadi, para anggota PDIP (kader) di setiap daerah, harus melaksanakan pendidikan kader dan kegiatan tersebut dilakukan sebelum adanya pileg dan bukan dilakukan saat menjelang pileg, Kegiatan ini pun dilaksanakan setiap tahunnya. Dan kegiatan ini juga sudah terlaksana dari tahun-tahun sebelumnya dan memang pada saat itu kader PDIP yang berminat untuk mengikuti pecalegan, Salah satu syaratnya harus mengikuti pendidikan yang diawasi oleh badiklat.

⁹⁵Ir. Zulfikri Kadir (Ketua DPD PDIP kota Palembang), *Wawancara*, 24 April 2019

Pendidikan tersebut dilaksanakan selama 1 minggu sesuai dengan petunjuk dimana pematerinya berasal dari DPP dan ada juga yang dari DPP dan PDIP sendiri sudah melaksanakan pendidikan kader pratama kurang lebih sebanyak 1.500 anggota yang telah mengikuti pendidikan tersebut.⁹⁶

Pada tahap selanjutnya, apabila caleg tersebut dinyatakan lolos dari sekian banyak peserta yang mengikuti pendidikan kader pratama yang programnya tersebut dilakukan oleh PDIP, maka caleg tersebut akan masuk daftar caleg sementara (DCS) dimana nama-nama para caleg akan dikirim ke KPU. Selanjutnya apabila tidak ada perbuatan yang dilakukan PDIP maka nama-nama apara caleg tersebut akan menjadi daftar caleg tetap (DCT) dan apabila sudah menjadi daftar caleg tetap maka tidak bisa dirubah (diganggu gugat) kecuali calon tersebut meninggal dunia atau pindah ke partai lain. Setiap DPC yang ada di kabupaten kota harus memenuhi 30% kader perempuan dari partai itu sendiri dan kader perempuan dinyatakan menjadi kader mereka harus mengikuti pendidikan kader, tetapi tidak seluruhnya menjadi kader, misalnya mereka yang harus mengikuti pencalegan ada 100 anggota maka hanya 5 anggota yang akan dipilih untuk mengikuti tingkat madya.⁹⁷

Strategi yang dilakukan oleh PDIP dalam melakukan penyaringan caleg, para kader yang diberikan mandat untuk mencaleg tersebut sudah mempunyai basis, yang dimaksud adalah kader tersebut sudah bekerja sebelumnya dalam artian bekerja membangun kolegtifitas anak ranting, membangun kolegtifitas

⁹⁶ Ir. Zulfikri Kadir (Ketua DPD PDIP kota Palembang), *Wawancara*, 24 April 2019

⁹⁷ Ir. Zulfikri Kadir (Ketua DPD PDIP kota Palembang), *Wawancara*, 24 April 2019

kerja-kerja partai dan melakukan sosialisasi yang sudah dilaksanakan, jadi inilah strategi yang dilakukan. Strategi PDIP tersebut memiliki mesin partai yang sudah ada sampai di kelurahan dan itulah mesin partai yang dilakukan oleh PDIP, karena kolektifitas PDIP sekarang seperti saksi PDIP mempunyai badan saksi nasional, jadi saksi tersebut ditanggung oleh partai, maka setiap caleg akan memiliki saksi dari partai.

1. Metode Rekrutmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

PDIP dalam melakukan rekrutmen bakal calegnya menggunakan metode rekrutmen tertutup, yaitu dengan mengambil dari kader partai yang memiliki loyalitas terhadap partai. Selain itu, proses yang dilaksanakan juga tertutup dari media massa atau hanya kalangan internal partai yang lebih mengetahui. Namun, pihak partai juga tidak menutup kemungkinan jika ada pendaftar dari luar partai yang berpotensi, seperti hasil wawancara yang diungkapkan oleh ketua DPC PDIP kota Palembang berikut ini :

“Rekrutmen caleg PDI-Perjuangan memang tidak diumumkan di media massa karena PDI-Perjuangan mengutamakan kader partai yang telah bersama-sama berjuang dan membesarkan nama partai, meskipun demikian, PDI Perjuangan tetap merekrut beberapa pendaftar yang berasal dari luar partai untuk menjadi bacaleg, yang intinya harus memiliki keilmuan, pengaruh dan ketokohan ditengah-tengah masyarakat.”⁹⁸

⁹⁸Ir. Zulfikri Kadir (Ketua DPD PDIP kota Palembang), *Wawancara*, 24 April 2019

Menurut hasil wawancara di atas, PDI Perjuangan kota Palembang pada Pemilu 2014 lebih memprioritaskan dari kader internal partai sesuai intruksi DPP PDIP. Jadi anggota-anggota dan kader partai harus dipersiapkan agar mampu menduduki jabatan-jabatan politik pada jejang yang lebih tinggi sehingga dapat membawa pengaruh yang besar di masyarakat dan dapat membawa nama besar partai tentunya.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan untuk merekrut bakal caleg dari luar partai yang memiliki pengaruh dan nama besar di masyarakat dan orang yang berbakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses politik, dimana hal tersebut dapat memberi nilai lebih bagi partai, sehingga dengan keberadaan figur calon legislatif tersebut diharapkan mampu dan bersedia memberikan kontribusi untuk membesarkan partai serta mewujudkan cita-cita dan tujuan partai.

2. Indikator

Keanggotaan dan sistem kaderisasi partai PDIP :⁹⁹ Bab IV

Pasal 10

- 1) Anggota partai adalah calon anggota yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai anggota.
- 2) Keanggotaan partai terdiri atas :
 - a) Anggota biasa;
 - b) Anggota kader;

⁹⁹AD/ART Partai PDIP

c) Anggota kehormatan.

Pasal 12

- 1) Kader partai adalah anggota partai yang dedikasi, loyalitas, dan pengabdianya kepada partai dan masyarakat umum tidak tercela.
- 2) Jejang kader partai adalah :
 - a) Kader pratama
 - b) Kader madya
 - c) Kader utama

Indikator rekrutmen PDIP dalam proses pencalegan mungkin berbeda dengan kebanyakan partai lain, karena lebih mementingkan dari para kader yang memiliki loyalitas tinggi terhadap partai. Seperti hasil wawancara penulis dengan Bapak Zulfikri Kadir sebagai berikut :

“Indikator rekrutmen dari parpol harus betul-betul diperbaiki, caranya, seleksinya. Jangan sembarang orang saja yang direkrut. Orang-orang yang tidak memenuhi kriteria sebaiknya jangan dipilih oleh parpol. Jadi, jelas orangnya terdaftar dan dididik. jangan hanya dipilih karena duitnya banyak dan berpengaruh, tanpa memperhatikan moralnya. Jangan ada deal-deal yang tidak benar. Harus tetap dengan prosedur-prosedur yang benar. Intinya, calon yang bersangkutan itu punya kejelasan visi, tahu apa tugas yang akan diembannya, dan bagaimana langkah langkahnya. Hal itu semua bisa kita lihat dari para kader dan loyalitasnya terhadap partai.”¹⁰⁰

¹⁰⁰Ir. Zulfikri Kadir (Ketua DPD PDIP kota Palembang), Wawancara, 24 April 2019

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa PDI Perjuangan dalam melakukan seleksi caleg memiliki indikator yang lebih tegas, meskipun sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk mengambil calon dari luar yang dinilai berkompeten, namun tetap mengutamakan dari kader yang memiliki loyalitas terhadap partai. Sehingga proses rekrutmen tidak hanya dijadikan sebagai ritual partai politik menjelang pemilu. Dengan demikian, diharapkan akan didapatkan orang-orang bakal caleg yang memang berkualitas dalam menduduki jabatan elite politik nantinya.

3. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Rekrutmen Caleg PDI-P

Dalam internal partai masalah yang masih dihadapi adalah salah satunya masalah administrasi dalam struktural sehingga untuk mengikuti pemilu masing-masing dapil masih susah untuk mendapatkan calon yang bagus, misalnya masih adanya calon yang bukan dari pengurus. Dengan demikian kader yang ada tidak semua dari pengurus melainkan calon yang diorbitkan. Masalah lain yang ditemukan adalah karena keterbatasan kader maka sebagai posisi ketua bisa menjabat berulang-ulang. Begitu juga dalam proses pencalegkan, sehingga bagi para pengurus seperti ketua, sekretaris maupun bendahara bisa memilih posisi atau nomer urut cantik. Kendala lain yang dihadapi adalah ketentuan dari pusat, bahwa masing-masing bakal calon harus mengikuti program psikotes dengan biaya sendiri. Semua biaya mulai dari proses seleksi sampai kampanye ditanggung oleh masing-masing caleg. Hal ini merupakan keterangan dari Bapak Zulfikri Kadir seperti berikut :

“Keuntungannya adalah karena kita PDIP adalah salah satu partai yang sudah punya nama di kota Palembang, jadi lebih mudah berkampanye dan mendapat kepercayaan masyarakat. Kalau kendalanya ya sebenarnya jumlah kader yang berkualitas masih terbatas, jadi setiap orang bisa menjabat berulang-ulang. Dan untuk menjadi bakal caleg kan ada ketentuan dari pusat untuk psikotes dan itu wajib...”¹⁰¹

4. Perbedaan Rekrutmen Caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

Tabel . 5
Perbedaan Pola Rekrutmen Caleg PKS dan PDIP

	Aspek	PKS	PDIP
	Sumber Bacaleg	Hanya merekrut bacaleg kader, perekrutan bacaleg non-kader sangat jarang dilakukan.	Merekrut bacaleg baik kader maupun non-kader.
	krutmen tertutup	Dilakukan dengan penunjukkan/penawaran pada kader partai secara langsung.	Dilakukan dalam bentuk surat rekomendasi sebagai bahan pertimbangan
	krutmen terbuka	Semua masyarakat berkesempatan untuk dapat menjadi caleg PKS, akan tetapi harus mengikuti kaderisasi berjenjang terlebih	Semua masyarakat berkesempatan untuk dapat menjadi caleg partai PDIP asalkan lolos semua tahap seleksi bacaleg.

¹⁰¹Ir. Zulfikri Kadir (Ketua DPD PDIP kota Palembang), *Wawancara*, 24 April 2019

		dahulu	
	Waktu Pelatihan caleg Non Kader	Fleksibel, dapat sebelum atau sesudah Bacaleg ditetapkan menjadi caleg namun tetap bersifat wajib.	Harus diikuti sebelum ia ditetapkan menjadi caleg partai PDI-P.
	eksi awal	Dengan mewajibkan Bacaleg membuat paper tentang visi misi dengan menurunkan <i>platform</i> partai.	Dengan test, wawancara umum tentang ketugasan dewan, dan test psikologis.
	Media sosialisasi pada masyarakat	Menggunakan pamflet yang ditempel di kantor DPD PKS	Menggunakan media massa cetak maupun elektronik, membuka pengumuman di website resmi.

Tabel perbedaan tersebut menunjukkan bahwa PKS hanya merekrut bacaleg yang sejak dini turut mendukung kemenangan pemilu PKS dan aktif dalam partai. PKS tidak sembarang merekrut bacaleg yang sebelumnya belum pernah aktif dalam kegiatan kepartaian di PKS. Sehingga tidak semua bacaleg yang hendak menjadi caleg dapat lolos begitu saja karena dalam proses seleksi pun dinilai juga keaktifan dan kontribusinya terhadap PKS, semakin aktif ia di organisasi maka kesempatan untuk lolos menjadi caleg semakin besar. Hal ini juga terkait dengan pendidikan politik yang PKS usahakan terhadap calon legislatif yang diusungnya, karena itu semua caleg PKS mayoritas memang orang-orang yang sudah benar-benar memiliki pengalaman berpolitik dan aktif dalam partai.

Dengan menerapkan pola rekrutmen seperti ini, caleg PKS rata-rata telah memiliki kemampuan baik secara teknis maupun non-teknis tentang ketugasan dewan karena dalam materi kegiatan kaderisasi yang dilakukan

untuk anggota maupun kadernya PKS mencakup juga hal-hal terkait ketugasan dewan. Selain itu, dengan terbiasanya mereka terhadap kegiatan organisasi partai, tentu secara langsung ataupun tidak langsung mereka telah melakukan pendidikan politik. Dengan organisasi, seseorang akan belajar bagaimana mengartikulasikan kepentingannya dalam sebuah forum diskusi, bagaimana ia harus belajar mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan umum, dan lain sebagainya.

Akan tetapi, dengan menerapkan pola rekrutmen tersebut juga menimbulkan dampak negatif bagi partai. Seperti dikutip dari wawancara dengan Ketua DPD PKS yaitu: “terkadang kami mengalami kekurangan jumlah caleg, sehingga terkadang kami terpaksa melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi kuota sesuai dengan kursi yang dibutuhkan meskipun nanti orang-orang yang dicalonkan tidak *fight* dalam pemilu” (hasil wawancara dengan M. Ridwan Saiman pada 26 April 2019).¹⁰² Dari kutipan wawancara tersebut, terlihat bahwa terkadang jumlah caleg yang lolos tidak sesuai dengan target (sebanyak kursi yang diperebutkan). Caleg tidak sepenuhnya *fight* dalam pemilu maksudnya adalah caleg tidak melakukan kegiatan seperti lazimnya caleg dalam pemilu, seperti melakukan kampanye, seleksi, dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan dampak yang biasanya terjadi dalam proses rekrutmen caleg PKS.

Sedangkan untuk DPC PDI-P, semua masyarakat dari berbagai lapisan dapat secara otomatis mendaftar sebagai bacaleg partai PDI-P dan memiliki

¹⁰² M. Ridwan Saiman (Ketua DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 26 April 2019

kesempatan yang sama, semua didasarkan atas hasil seleksi terhadap kemampuan dan loyalitas terhadap partai. Pola rekrutmen seperti ini memang tidak akan memungkinkan partai mengalami kekurangan jumlah caleg seperti yang dialami PKS, akan tetapi disisi lain pola seperti ini cenderung lebih beresiko untuk mendapatkan caleg yang tidak sesuai harapan. Dengan kata lain, pengalaman organisasi termasuk poin penting untuk memilih seorang caleg yang hendak mewakili partai.

Tabel. 6
Persamaan Rekrutmen Caleg PKS dan PDI-P

No	Aspek	Keterangan
1.	Pola rekrutmen caleg yang digunakan	Sama-sama menggunakan pola rekrutmen campuran, yakni rekrutmen terbuka dan tertutup.
2.	Kegiatan evaluasi	Kegiatan evaluasi diadakan setiap hari dalam rapat harian.
3.	Persentase perbandingan caleg kader dan non-kader	Variatif, atau tidak ditentukan secara mutlak.
4.	Kaderisasi	Sama-sama mewajibkan caleg untuk mengikuti pembekalan dasar dan kaderisasi berjenjang.

PKS dan PDI-P sama-sama menerapkan pola rekrutmen terbuka untuk umum dengan mekanisme lebih lanjut diatur oleh partai masing-masing. Pelaksanaan kaderisasi berjenjang merupakan suatu hal yang wajib dilakukan dalam rangka mempersiapkan sekaligus meningkatkan kualitas kader sebagai calon-calon anggota dewan bukan hanya mewakili partai, akan tetapi mewakili masyarakat luas. Seorang kader dituntut untuk dapat menguasai hal-

hal teknis maupun non-teknis mengenai ketugasan dewan, dapat secara baik mengagregasi kepentingan publik, serta memahami *platform* maupun manifesto perjuangan partai kedalam kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.

Tabel. 7
Jenjang Pengkaderan Partai PKS dan PDIP

Partai	Jenjang Kader	Uraian
PKS	Madya	Mereka yang telah lulus pelatihan kepartaian tingkat dasar dua
	Madya	Mereka yang telah lulus pelatihan kepartaian tingkat lanjut.
	Tinggi	Mereka yang telah lulus pelatihan kepartaian tingkat tinggi.
	Ahli	Mereka yang telah lulus pelatihan kepartaian tingkat ahli.
PDIP	Pertama	Kaderisasi yang dilakukan oleh partai di tingkat paling bawah, yaitu DPC
	Madya	Kaderisasi yang dilakukan oleh partai di tingkat menengah. Kaderisasi ini dilakukan oleh partai di tingkat provinsi.
	Pertama	Proses kaderisasi yang dilakukan di tingkat paling atas yaitu DPP. Kaderisasi ini diselenggarakan oleh partai yang ditujukan bagi kader yang akan menduduki posisi tertentu (jabatan politik pada eksekutif dan legislatif) dalam rangka mewujudkan dan mencapai tujuan partai.

Sebagaimana telah diuraikan di atas jenjang kaderisasi pada umumnya dibagi dalam tiga, yakni tingkat pertama dan/atau dengan nama lainnya, tingkat menengah/madya dan/ atau dengan nama lainnya, serta tingkat utama dan/atau dengan nama lainnya. Jenjang pengkaderan ini digunakan untuk membagi materi dan ketrampilan apa saja yang akan dimiliki oleh peserta kaderisasi sekaligus juga luaran (*outcomes*) apa yang akan dihasilkan pada masing-masing jenjang, baik yang terkait dengan peran yang akan diambil oleh para peserta kader dalam

internal partai maupun eksternal partai maupun mandat-mandat yang akan diberikan parpol pada peserta kaderisasi yang didasarkan visi, misi serta kebutuhan parpol dalam menjalankan fungsinya.

Tabel. 8
Organisasi Sayap Partai PKS dan PDIP

No	Kelompok Sosial	Partai Politik	
		PKS	PDIP
1.	Pemuda	Gema Keadilan, Yayasan Pemuda dan Pelajar Asia Pasifik (YPPAP), Gugus Tugas Dakwah Sekolah (GTDS)	Banteng Muda Indonesia (BMI)
2.	Agama	Kelompok Tarbiyah	Baitul Muslimin
3.	Mahasiswa	KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia)	Taruna Merah Putih (TMP)
4.	Profesi	Serikat Pekerja Keadilan (SPK) Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI), <i>Central for Indonesian Reform (CIR)</i>	Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GANTI).
5.	Relawan	Relawan Indonesia (Indonesia Volunteers)	Relawan Perjuangan Demokrasi Indonesia (Repdem)

Organisasi sayap partai menjadi sumber penting lainnya dalam kaderisasi partai politik. Melalui sayap partai internasionalisasi ideologi partai politik dan pembangunan karakter militansi dapat lebih mudah dilakukan dibandingkan sumber kaderisasi yang berasal dari organisasi masyarakat lainnya. Sebab, organisasi sayap merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sebuah partai politik. Organisasi sayap partai memberikan andil besar bagi partai politik baik dalam upaya implementasi, sosialisasi maupun diseminasi program dan kebijakan partai. Organisasi sayap partai dapat berbentuk organisasi pemuda, organisasi mahasiswa, organisasi perempuan, organisasi profesi, serta organisasi keagamaan.

Kaderisasi pada organisasi sayap partai biasa sekaligus menjadi perluasan basis dari parpol yang bersangkutan. Sebuah organisasi sayap atau *underbow* partai, dikembangkan dan diberdayakan oleh partai politik sebagai instrumen penting untuk menarik simpati dan dukungan massa baik untuk memenangkan pemilihan umum maupun untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan partai.

Selain itu, dalam proses pelembagaan partai, relasi parpol dengan organisasi massa merupakan salah satu cara untuk memperluas jumlah basis massa dari segi sumber daya manusia dalam proses pengkaderan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Perbandingan Rekrutmen Politik Calon Legislatif Partai PKS dan PDI-P dalam Pemilu Legislatif 2014 di Kota Palembang” yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Perbedaan pola rekrutmen calon anggota legislatif Partai PDI-P dengan PKS.

Ada beberapa perbedaan pokok rekrutmen calon legislatif partai PKS dan PDI-P di Kota Palembang. Perbedaan tersebut antara lain:

- a) PKS dalam melakukan upaya rekrutmen caleg melalui berbagai jenjang pengkaderan yang menentukan jabatan struktural. Metode rekrutmen politik PKS kota Palembang dilakukan dengan cara tertutup dan terbuka. Proses rekrutmen dari tubuh PKS melalui proses terbuka yaitu caleg tidak harus dari struktural misalnya simpatisan bisa jadi kader. Sedangkan, proses tertutup yaitu struktural yang mencari caleg baik dari luar ataupun dari dalam partai, melalui elite politik dari struktur partai yang mencari dan melakukan pendekatan terhadap calon yang dianggap berkompeten

baik dari dalam maupun luar partai dengan proses seleksi keduanya harus memenuhi syarat. Sedangkan mekanisme perekrutan caleg yang dilakukan oleh PDI-P dengan cara membentuk tim penyaringan caleg, yaitu dibuka pendaftaran pencalegan bagi seluruh kader PDIP khususnya kader yang bisa mengikuti pencalegan ini adalah kader yang sudah mengikuti pendidikan kader.

- b) PKS hanya merekrut Bacaleg kader, karena bacaleg PKS haruslah terlebih dahulu mengadakan kerjasama dan turut mendukung kemenangan partai dalam waktu yang relatif lama (dengan kata lain harus menjadi kader partai terlebih dahulu). Sedangkan partai PDI-P merekrut Bacaleg baik kader maupun non-kader, Bacaleg non-kader (tokoh masyarakat) boleh berasal dari orang yang sebelumnya belum pernah mengadakan kerjasama dengan partai PDI-P, asalkan memang Bacaleg memiliki kapabilitas dan loyalitas terhadap partai.
- c) Dalam melakukan upaya rekrutmen caleg, partai PKS hanya merekrut Bacaleg kader. PKS sebagai partai yang berasaskan agama memiliki sifat agama yang *Inklusif* (terbuka) maka yang akan menjadi bacaleg harus sesuai dengan kriteria yang sesuai dengan AD/ART partai. PKS tidak sembarang merekrut bacaleg yang sebelumnya belum pernah aktif dalam kegiatan kepartaian di PKS. Sehingga tidak semua bacaleg yang hendak menjadi caleg dapat lolos begitu saja karena dalam proses seleksi pun dinilai juga keaktifan dan kontribusinya terhadap partai, semakin aktif ia di organisasi maka kesempatan untuk lolos menjadi caleg semakin besar. Hal

ini juga terkait dengan pendidikan politik yang PKS usahakan terhadap calon legislatif yang diusungnya, karena itu semua caleg PKS mayoritas memang orang-orang yang sudah benar-benar memiliki pengalaman berpolitik dan aktif dalam partai. Sedangkan partai PDI-P merekrut Bacaleg baik kader maupun non-kader. Bacaleg non-kader (tokoh masyarakat) dari berbagai lapisan dapat secara otomatis mendaftar sebagai bacaleg partai PDI-P dan memiliki kesempatan yang sama, baik berasal dari orang yang sebelumnya belum pernah mengadakan kerjasama dengan partai PDI-P, asalkan memang bacaleg memiliki kapabilitas dan loyalitas terhadap partai. Semua didasarkan atas hasil seleksi terhadap kemampuan dan loyalitas terhadap partai. Perihal partai PDI-P memberikan kebebasan yang sama kepada semua warga negara untuk menjadi Caleg. Ini berdasarkan 3 indikator pola rekrutmen Rush dan Althoff yaitu: pertama, penyediaan rekrutmen politik terhadap Caleg, DPC partai PDI-P menyediakan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk mencalonkan diri. Kedua, Kriteria rekrutmen politik pemimpin, syarat/kriteria Caleg oleh Partai PDI-P. Ketiga, kontrol rekrutmen politik dilakukan pada bakal calon Legislatif dari internal dan eksternal partai.

- d) Dari penjelasan kedua partai ditemukan bahwa pola rekrutmen yang dipakai partai PDI-P sesuai dengan teori pola rekrutmen Rush dan Althoff perihal partai PDI-P memberikan kebebasan yang sama kepada semua warga negara untuk menjadi Caleg. Sedangkan PKS tidak.

B. Saran

1. Penelitian tentang rekrutmen caleg di tingkat lokal harus tetap dilakukan untuk menguji partai-partai dalam menentukan kualitas caleg yang diajukan dalam pemilu. Penelitian rekrutmen caleg di tingkat lokal lebih kompleks, mengingat banyaknya caleg-caleg baru yang muncul. Semakin banyak caleg baru yang muncul, problem kualitas selalu menjadi ancaman baru bagi pembangunan demokrasi.
2. Dalam konteks yang luas, penelitian ini terbatas pada perbandingan rekrutmen caleg DPD PKS dan DPC PDIP di kota Palembang. Namun studi ini memberi sumbangan pemikiran terhadap proses rekrutmen caleg kedua partai untuk menjadi pertimbangan atas kekurangan dalam rekrutmen caleg.
3. Untuk kedua partai agar dapat mempertimbangkan kader dari luar partai yang mumpuni untuk dijadikan caleg, bukan hanya sekedar merekrut tokoh sebagai *vote gater* (strategi mendulang suara).

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. Zainal. *Peran Politik Partai Keadilan Sejahtera Kotamadya Yogyakarta Dalam Kebijakan Publik*, Program Pasca Sarjana Sunan Kalijaga, 2008.
- Agustino ,Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Adriana Elisabeth Sukamto, dkk. 1991. *PDI dan Prospek Pembangunan Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi (Cetakan Ketiga). PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Burhanuddin, Muhtadi. 2012. *Dilema PKS dan Syariah*. Kepustakaan Populer Gramedia: Jakarta.
- Cornelis lay. 2010. *Melawan Negara PDI 1973-1986*. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo
- Dudug, Abdurrahman. 2011. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Ombak.
- Dwipayana, AAGN Ari. 2012. *Memperkuat Pelembagaan Partai Politik*. Makalah dalam seminar “Pelembagaan Partai Politik”, diselenggarakan oleh Pusat Studi Pancasila UGM, Yogyakarta.
- Ghaffar, Affan. “Demokrasi Empiris Dalam Era Orde Baru” dalam Alfian Dan Nazaruddin Syamsuddin, *Budaya Politik Indonesia*, Jakarta: Grafiti, 1991
- Hutington, Samuel P. 2003. *Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Masa*. Edisi 1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Josef Christofel, Nalenan. 2008. *Pendidikan Politik, Parpol dan Pemilu Legislatif* Jakarta: Jaringan Pemilih Pemilu Rakyat.
- Lingar Kharisma Suseno. *Pola Afiliasi Informal Organisasi Gerakan Mahasiswa dengan Partai Politik*”, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas FISIP, Universitas Diponegoro.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan kedua puluh delapan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mohammad, Najib. 2008. *Penentuan Calon Terpilih Anggota DPR, DPRD dan DPD Dalam Pemilu Legislatif*, Yogyakarta: UGM.

Pamungkas, Sigit. *Afiliasi Pemilih Nasionalis dan Ideologi Dalam Pemilu Legislatif 2009*, Yogyakarta: UGM, 2008

Romli, Lili. 2011. Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia. *Jurnal Politica* Vol. 2 No. 2

Sugiono. 2004. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora*, (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah

Zuly Qodir. 2012. *Sosiologi Politik Islam : Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal :

Jurnal: *Dinamika Masyarakat (Partai Politik)*. 2005. Oksidelfa Yanto. Peran dan Fungsi Partai Politik dalam Tatanan Demokrasi: Antara Harapan dan Kenyataan. Jakarta: Kedepuitian Bidang Dinamika Masyarakat.

Mahadi, Helmi. 2011. *Pragmatisme Politik: Proses Rekrutmen Politik PDIP pada Pilkada Kabupaten Sleman*, Yogyakarta: 2011

Wakhidatul, Afifa, *Implementasi Fungsi Partai Politik sebagai Sarana Rekrutmen Politik pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)*, Universitas Negeri Semarang: 2011.

Khoiruly Riski, *Sistem Rekrutmen dan Kaderisasi PDI-P Kabupaten Kendal Era Reformasi*, Universitas Diponegoro: 2013.

Sonhaji, Ahmad, *Proses Rekrutmen Anggota DPRD Hasil Pemilu 2004 Di Kabupaten Wonogiri*, Surakarta: FISIP Universitas Sebelas Maret. 2005

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang *Partai Politik*

Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 51 tentang sistem terbuka dalam rekrutmen caleg partai.

Website:

<http://pks.id/file/ad-art-pks> diakses pada 05 April 2019 pukul 16:39 WIB

<https://www.pdiperjuangan.id/article/category/child/28/Partai/AD/ART> diakses pada 08 April 2019

<http://palembang.Tribunnews.com/2014/04/21/kpu-kota-palembang-sahkan-hasil-rekapitulasi>. diakses pada Kamis 24 April 2014



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

SURAT KETERANGAN

No.B- /Un.09/IV.2/PP.02/24/06/2019

Ketua program studi Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang menerangkan Bahwa :

Nama : Tutyk Andini
Nim : 1564302028
Program Studi : Politik Islam

Telah mengikuti Ujian Komprehensif dan dinyatakan Lulus dengan nilai kumulatif **78 (Baik)** dan selanjutnya dapat mengikuti ujian munaqosah.

Demikianlah surat keterangan ini di berikan untuk dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.

Palembang , 2 Juli 2019

Wakil Dekan I

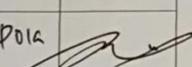
Dr. Endang Rocmiatun, M.Hum
NIP: 197007271997032005

Mengetahui,
Ketua Prodi,

Dr. Moh. Syawaluddin, M.A
NIP: 197111242003121001

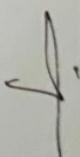
HALAMAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Pembimbing II : Ryllian Chandra Eka Viana, M.A.

No	Hari / Tanggal	Pembahasan	Saran	paraf
6.	19 / 04 19	Pembahasan Bab <u>IV</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Buat tabel Perbandingan Pola rekrutmen kedua Partai - jelaskan bagaimana pola rekrutmen kader dan non kader 	
7.	20 / 05 19	Bab <u>IV</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Lanjutkan Bab <u>IV</u> Kesimpulan - Acc Bab <u>IV</u> - Si akan Draft keseluruhan 	
8.	5 / 07 19	Bab <u>V</u> dan Daftar Pustaka	<ul style="list-style-type: none"> - perbaiki kesimpulan - kesimpulan sesuai dengan hasil penelitian bukan rangkuman atau ringkasan - mekanisme Penulisan di perbaiki - Perbaiki daftar pustaka 	
9.	8 / 07 19		<ul style="list-style-type: none"> - perbaiki draft akhir yg akan disidangkan 	

HALAMAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nola Mustika
 Nim : 1564302021
 Fakultas : Adab dan Humaniora
 Judul Skripsi : Perbandingan Rekrutmen Politik Calon Legislatif Partai PKS dan PDIP dalam Pemilu Legislatif 2014 Di Kota Palembang
 Pembimbing II : Dr. Yazwardi, M.Ag.

No	Tanggal	Pembahasan	Saran	Paraf
1.	22/1/19	<ul style="list-style-type: none"> Perhatikan teknik penulisan Urangta tentang pada bab I dipindah ke bab II Buat pedoman wawancara yang disesuaikan dengan nomor surat dan Urangta tentang 		
2.	29/1/19	<ul style="list-style-type: none"> Fokus pada teori tertentu saja agar dapat memberikan perspektif dan fokus pada pada pelaksanaan Caleg. Data yang akan diambil fokus juga dengan teori yang dipilih 		
3.	15/2/19	<ul style="list-style-type: none"> Perbaiki sistematika / Nomor pada bab II. Tentukan ke bab III 		



HALAMAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nola Mustika
NIM : 1564302021
Fakultas : Adab dan Humaniora
Jurusan : Politik Islam
JudulSkripsi : Perbandingan Rekrutmen Politik Calon Legislatif Partai PKS dan PDI-P dalam Pemilu Legislatif 2014 di kota Palembang
Pembimbing I : Dr. Yazwardi, M.Ag

No	Hari / Tanggal	Pembahasan	Saran	paraf
4.	19/2/19	- Apa pedoman wawancara - melalui Pengambilan data - lanjut ke bab III		
7	8/7/19	- belum terlibat <u>Urgensi</u> Penelitian dan Partai yang kubada Pakem dalam hal Pencapaian --- Kenapa? - Apa pengaruh bahwa PKS hanya mengambil 'Cakar sebagai Calon', sedangkan PDI-P tidak karena? - Transkrip dan atom rekaman wawancara - lihat Hal. 88.		



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Pada hari ini, RABU tanggal 24 JULI 2019 pukul 08:00 s.d. 09:00 WIB
Team Penguji Munaqasyah mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah
Palembang telah mengadakan Sidang Munaqasyah (Ujian skripsi) mahasiswa:
Nama : NOLA MUSTIKA *
T.Tgl Lahir : MUS. BANYUASIH / 29 NOV 1995 * (*sesuai ijazah SLTA)
NIM : 1564302021
Judul skripsi : PERBANDINGAN REKRUITMEN POLITIK CALON
LEGISLATIF PARTAI PKS DAN PDIP DALAM
PEMILU LEGISLATIF 2014 DI KOTA PALEMBANG

Dan memutuskan bahwa:

1. Setelah lulus seluruh mata kuliah dan mengikuti Ujian Munaqasyah, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan **LULUS/TAHAP LULUS** munaqasyah dengan nilai: 78 (B)
2. Perbaikan dengan Team Penguji selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal sejak ditetapkannya berita acara ini.
3. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan belum diselesaikan perbaikan, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan untuk mengikuti Ujian Munaqasyah kembali.
4. Setelah mahasiswa ybs memenuhi persyaratan poin 1, 2, 3, maka penjiilidan skripsi harus mengambil surat pengantar dari subbag akademik untuk persyaratan mengikuti yudisium dan wisuda
5. Apabila terdapat kekeliruan dalam berita acara ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEAM PENGUJI

JABATAN	NAMA/NIP	ANDATANGAN
KETUA	DR. M. SYAWALUDIN, M. Ag	1.
SEKRETARIS	ISNAIHI RAHMAWATI, M. Hum	2.
PENGUJI I	DR. M. SYAWALUDIN, M. Ag	3.
PENGUJI II	NICO OKTARIO A, MA	4.
PEMBIMBING I	DR. YAZWARDI, M. Ag	5.
PEMBIMBING II	RALIAN CHANDRA, MA	6.

Ketua,

DR. M. SYAWALUDIN, M. Ag
NIP. 1971112920031200

Ditetapkan di : Palembang
Tanggal : 24 Juli 2019
Sekretaris,

ISNAIHI RAHMAWATI, M. Hum
NIP. 2008080301



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Nomor : B- 4/62 /Un.09/TV.1/PP.01/ 02 /2019
Lampiran : 1 (satu) lbr
Perihal : Mohon izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua DPD Partai Keadilan
Sejahtera Kota Palembang
di Palembang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sehubungan dengan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, maka dengan ini kami mohon kepada bapak/ibu kiranya dapat memberikan izin penelitian/observasi kepada mahasiswa kami sbb:

No	Nama/NIM	Jurusan/ Prodi	Tempat Penelitian/ observasi	Judul Penelitian/ data yang dicari
1	Nola Mustika 1564302021	Politik Islam	Kantor DPD PKS Kota Palembang	Perbandingan Rekrutmen Politik Calon Legislatif PKS dan PDI-P Dalam Pemilu Legislatif 2014 di Kota Palembang

Untuk melakukan pengambilan data penelitian/ observasi
lama pengambilan data : 20 Februari – 30 Mei 2019

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon bapak/ibu tidak berkeberatan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa kami, sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam binaan bapak/ibu, untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 19 Februari 2019

Dekan

Nor Huda, M.Ag, M.A
NIP. 197007272000031002



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Nomor : B- 462 /Un.09/IV.1/PP.01/02/2019
Lampiran : 1 (satu) lbr
Perihal : Mohon izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua DPD Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan
Kota Palembang
di Palembang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sehubungan dengan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, maka dengan ini kami mohon kepada bapak/ibu kiranya dapat memberikan izin penelitian/observasi kepada mahasiswa kami sbb:

No	Nama/NIM	Jurusan/ Prodi	Tempat Penelitian/ observasi	Judul Penelitian/ data yang dicari
1	Nola Mustika 1564302021	Politik Islam	Kantor DPD PDI-P Kota Palembang	Perbandingan Rekrutmen Politik Calon Legislatif PKS dan PDI-P Dalam Pemilu Legislatif 2014 di Kota Palembang

Untuk melakukan pengambilan data penelitian/ observasi
Lama pengambilan data : 20 Februari – 30 Mei 2019

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon bapak/ibu tidak berkeberatan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa kami, sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam binaan bapak/ibu, untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 19 Februari 2019



Dr. Huda, M.Ag, M.A
NIP. 197007272000031002

Knowledge, Quality & Integrity



Nomor : 038/Lab FAHUM/64/Tahfidz/N/2019

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
LABORATORIUM FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Dengan ini menyatakan bawah :

Nama : NOLA MUSTIKA
Nim : 1564302021
Prodi : Politik Islam
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 8 November 1995

Telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pada program

TAHFIDZ AL-QURAN

Dengan Predikat :

Amat Baik / Baik / Cukup / Kurang

Diberikan di Palembang pada tanggal 13 Mei 2019

Kepala Laboratorium,



Drs. Abdurasyid, M.Ag
NIP. 196702221994031003



Dekan
Fakultas Adab dan Humaniora
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NIP. 197011142000031002





CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

Number: 350/V/SE/ST/1/2019

This is to certify that

NOLA MUSTIKA

has already taken TOEFL Prediction Test at Victory Sriwijaya Education
On May 27th, 2019 with the following scores:

Listening Comprehension	: 39
Structure and Written Expression	: 43
Reading Comprehension	: 40
TOTAL	: 406

This score record is valid for 6 (six) months

Palembang, May 27th, 2019

Budi Setiawan
Chief Executive Officer
Victory Sriwijaya Education



Dengan
Nama
Nim
Prodi
Tempat
Tel



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dengan Nama Allah SWT

KULIAH KERJA NYATA (KKN) MANDIRI TAHUN 2017
TEMA "KKN BERBASIS RISET DAN PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL BERKARAKTER"

Sertifikat

No : B-425/ Un.09/PP.06/01/2018

Diberikan kepada :

Nela Mustika

Tempat / Tgl. Lahir : Palembang, 28 November 1995

NIM : 1564302021

Fak / Prodi : Adab & Humaniora / Politik Islam

Telah Melaksanakan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Tahun 2017

Tema "KKN Berbasis Riset Dan Pengembangan Potensi Lokal Berkarakter"

Dari Tanggal 27 November 2017 s/d 04 Januari 2018 di :

Kelurahan : Sri Mulya

Kecamatan : Sematang Borang

Kota : Palembang

Provinsi : Sumatera Selatan

Lulus dengan nilai : A

Kepadaanya Diberikan Hak Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku

Palembang, 22 Januari 2018

Ketua



Sy
Dr. Syeriyeni, M.Ag

NIP. 19720901 199703 2 003



Bertifikat

Diberikan Kepada :

NAMA : NOLA MUSTIKA
NIM : 14421021

Sebagai Peserta Didik Baca Tulis Al-Quran dan Dinyatakan
Lulus Dengan Nilai A

Menggetahui
Dekan,



M. R. Suyuthi

Prof. Dr. H. J. Suyuthi Pulungan, M.A.
NIP. 19560713 198503 1 001

Palembang, November 2015
Ketua

Maryuzi S. Ag

Maryuzi, S. Ag
NIP. 19700901 200003 1 003

Biodata Penulis



- 1. Nama : Nola Mustika**
- 2. Jenis Kelamin : Perempuan**
- 3. Tempat Tgl. Lahir/ Usia : Palembang, 28 November 1996**
- 4. Pekerjaan : Mahasiswa**
- 5. Agama : Islam**
- 6. Alamat : Jl. Lematang Raya No 1966**
- 7. Nama Orang Tua**
 - Ayah : Jamhur**
 - Ibu : Nurida**
- 8. Email : nolamustika3@gmail.com**
- 9. Pengalaman Organisasi :**
 - Anggota Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) Fakultas Adab UIN Raden Fatah Palembang periode 2015-2016**
 - Anggota Departemen Kajian dan Partisipasi Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Masika-ICMI) Orda Palembang Periode 2017-2019**